



# PENGELOLAAN **SEKOLAH BERASRAMA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2018



# **PENGELOLAAN SEKOLAH BERASRAMA**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018**

## **Kajian Pengelolaan Sekolah Berasrama**

### **Tim Penyusun :**

Novrian Satria Perdana, S.E., M.E.  
Dr. Suwandi, M.Psi.  
Irsyad Zamjani, Ph.D.  
Herman Hendrik, S.Sos., MPP ME  
Sugih Biantoro, M.Hum.

ISBN : 978-602-0792-05-7

### **Penyunting :**

Dr. Mahdiansyah, MA  
Nur Berlian Venus Ali, M.SE  
Dra. Lucia Hermien Winingsih, MA, Ph.D.

### **Penerbit :**

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### **Redaksi :**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19  
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. +6221-5736365  
Faks. +6221-5741664  
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>  
Email: [puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id)

Cetakan pertama, Desember 2018

### **PERNYATAAN HAK CIPTA**

© Puslitjakdikbud/Copyright@2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan buku laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku laporan hasil penelitian ini.



Jakarta, Juli 2018

Kepala Pusat,

Muktiono Waspodo

NIP 196710291993031002

## KATA PENGANTAR

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara. Kewajiban pemerintah ialah melindungi dan mendukung hak tersebut. Hal ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Berdasarkan pasal tersebut pemerintah mengupayakan suatu sistem pendidikan nasional yang dapat diakses oleh warga negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Tujuan pendidikan tersebut disebutkan pula dalam Renstra 2015-2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjelaskan dalam visinya tahun 2019 adalah terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong.

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang dapat dijangkau (akses), bermutu, dan berkarakter sesuai dengan amanah UUD 1945, mencapai tujuan dan visi misi pendidikan nasional, pemerintah mengupayakan beberapa program strategis yang salah satunya berupa sekolah dengan memiliki fasilitas asrama. Sekolah berasrama adalah sistem sekolah dengan asrama, di mana peserta didik, para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Salah satu tujuannya adalah agar anak memperoleh pendidikan secara

berkesinambungan dengan mencontoh langsung praktik baik pendidikan dari para guru dan pembimbing (aspek keteladanan). Adanya program sekolah berasrama merupakan program pembinaan akademik dan multibudaya dengan empat pilar pengembangan, yaitu mental spiritual, wawasan akademik, minat dan bakat, dan sosial budaya, diharapkan mampu menjawab kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan oleh keberagaman latar belakang budaya, agama, status sosial ekonomi, asal daerah dan pengaruh negatif globalisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah suatu penelitian tentang Sekolah Berasrama yang bertujuan untuk merumuskan model pengelolaan sekolah berasrama dalam upaya peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu, dan penanaman nilai karakter peserta didik secara berkesinambungan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2017

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	12
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Hasil yang Diharapkan.....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS .....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Teoritis.....	14
B. Kajian Empiris (Analisis Data Sekunder).....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>83</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	83
B. Fokus, Lokasi, dan Sampel Penelitian .....	83
C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	86
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....</b>	<b>88</b>
A. Provinsi Sumatera Selatan .....	88
B. Provinsi Banten.....	100
C. Provinsi Kalimantan Barat.....	118
D. Provinsi Jawa Tengah .....	128
E. Kebijakan Strategis .....	136
<b>BAB V SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN.....</b>	<b>153</b>
A. Simpulan .....	153
B. Opsi Kebijakan.....	160
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>162</b>

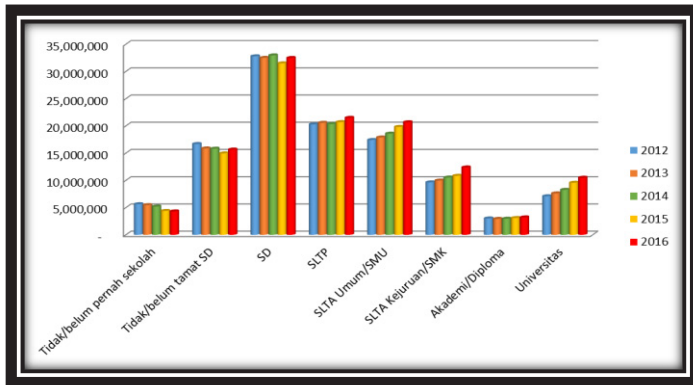


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu contoh negara berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi namun tingkat pertumbuhan ekonomi masih rendah. Rendahnya pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan masyarakat terutama yang sedang bekerja yang disebabkan oleh rendahnya capaian tingkat pendidikan masyarakat. Salah satu gambaran masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat dapat dinyatakan dalam rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pekerja di Indonesia. Berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia umur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut ijazah/STTB tertinggi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012-2016, hingga saat ini jumlah latar belakang pendidikan penduduk di Indonesia yang terbesar adalah jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga mencapai lebih dari 30 juta pekerja, kemudian berturut-turut adalah pekerja lulusan SLTP, SMU, belum tamat SD, SMK, dan seterusnya (Grafik 1.1).



*Sumber: Badan Pusat Statistik (2017).*

**Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Indonesia Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2012-2016**

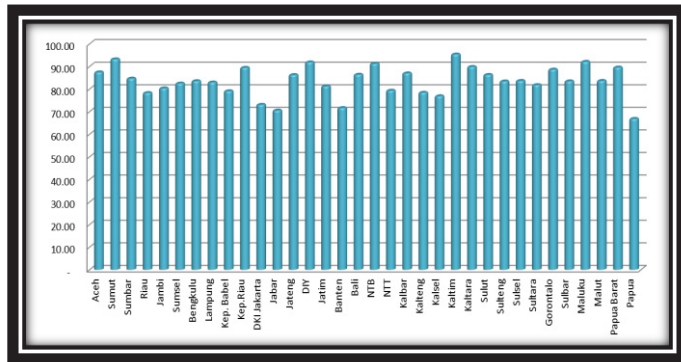
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa pendidikan terakhir penduduk Indonesia yang terbanyak adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Banyaknya lulusan SD yang tidak diikuti dengan jumlah lulusan ke jenjang berikutnya dikhawatirkan dapat menghambat produktivitas pekerja akibat rendahnya tingkat pendidikan/pengetahuan yang mereka peroleh, karena pada dasarnya lulusan jenjang pendidikan dasar (SD) masih belum memiliki keterampilan kerja yang berkualitas sehingga dikhawatirkan akan menganggur atau bila bekerja dikhawatirkan akan kalah bersaing dengan pekerja dari negara lain dalam era perdagangan bebas.

Salah satu penyebab rendahnya latar belakang pendidikan masyarakat di Indonesia adalah masalah akses memperoleh pendidikan. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Kondisi saat ini tingkat partisipasi anak untuk bersekolah hingga jenjang pendidikan menengah masih rendah dan bahkan terdapat kesenjangan yang tinggi terkait partisipasi

anak untuk bersekolah antarprovinsi. Salah satu indikator partisipasi anak untuk bersekolah adalah APK. Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan Grafik 1.2 di bawah ini, hingga saat ini APK jenjang SM/SMK/MA Indonesia sebesar 80,89 persen dan masih sebesar 29,41 persen provinsi yang nilai APK di bawah rata-rata nasional. Selain itu, disparitas APK antarprovinsi juga terlihat jelas sehingga hal ini mengindikasikan masih belum meratanya aksesibilitas memperoleh pendidikan.



*Sumber: Badan Pusat Statistik (2017).*

**Grafik 1.2 Rata-rata Nilai APM SM/SMK/MA Tahun 2016**

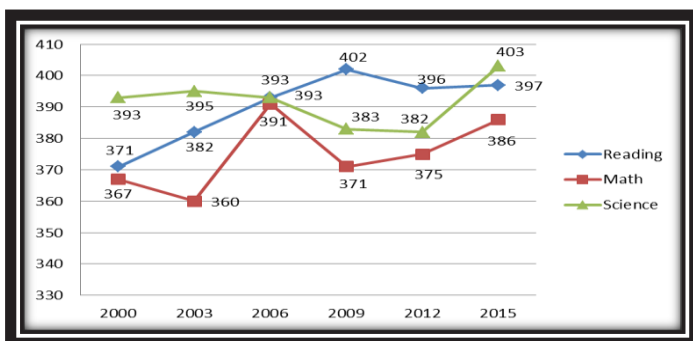
Banyaknya anak-anak yang belum bisa mengakses pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah, diduga berasal dari kelompok-kelompok rentan yang belum mendapatkan akses pada pendidikan secara reguler. Kelompok-kelompok rentan dalam hal ini adalah anak-anak keluarga miskin dan anak-anak yang tinggal di wilayah yang jauh dari fasilitas pendidikan sekolah. Anak-anak keluarga miskin di sejumlah wilayah biasanya turut bekerja menopang ekonomi keluarga sehingga menyekolahkan mereka pada sekolah-sekolah reguler biasanya hanya menambah beban hidup mereka. Orang tua para pekerja anak ini biasanya akan tetap menuntut anaknya bekerja sepulang sekolah. Bahkan, banyak orang tua yang melarang anak-anaknya bersekolah sama sekali karena bersekolah hanya akan menghilangkan kesempatan mereka memperoleh

penghasilan. Anak-anak yang tinggal di kawasan terpencil juga rentan karena jarak dan keterbatasan akses transportasi ke sekolah. Tidak jarang anak-anak tersebut harus menempuh medan yang berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa mereka hanya untuk pergi ke sekolah.

Selain masalah akses, pendidikan di Indonesia dihadapkan pada masalah mutu. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Konsep tentang mutu pendidikan dengan demikian juga diartikan secara berbeda-beda, tergantung pada situasi, kondisi dan sudut pandang. Secara umum, mutu pendidikan dapat disimpulkan sebagai ukuran standar ideal yang ingin dicapai proses pendidikan melalui kegiatan bimbingan atau bantuan kepada anak didik untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan.

Namun sampai saat ini mutu pendidikan menengah Indonesia relatif rendah. Gambaran mutu pendidikan di Indonesia di antaranya tercermin dari capaian hasil belajar peserta didik dalam studi komparatif internasional yang diikuti selama ini, seperti *Programme for International Student Assessment*

(PISA). Hasil yang dicapai peserta didik Indonesia pada studi tersebut berada di bawah rata-rata internasional (skor 500) untuk semua mata pelajaran yang diujikan (lihat Grafik 1.3). Pada tahun 2000 capaian kemampuan Matematika peserta didik Indonesia usia 15 tahun berada pada peringkat 39 dari 41 negara peserta. Capaian kemampuan Matematika peserta didik tetap rendah pada PISA yang diselenggarakan tahun 2003 yaitu berada di peringkat 38 dari 40 negara, serta peringkat 50 dari 57 negara peserta pada tahun 2006 (Puspendik, 2012). Selanjutnya, pada PISA 2012 capaian kemampuan Matematika peserta didik Indonesia semakin terpuruk menjadi peringkat 64 dari 65 negara. Sebagai pembandingan, prestasi akademik peserta didik Vietnam ternyata jauh lebih baik daripada Indonesia pada PISA 2012. Rata-rata skor capaian Matematika peserta didik Indonesia adalah 375 poin, sementara Vietnam mencapai 511 poin atau peringkat ke 17 dari 65 negara. Hasil yang menggembirakan terjadi pada tahun 2015 yang mana skor untuk kemampuan membaca menjadi 397, Matematika 386 dan *Science* menjadi 403. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan SDM Indonesia masih dapat terus ditingkatkan untuk memenangi persaingan Internasional.



Sumber: OECD, data diolah.

Grafik 1.3 Skor Hasil PISA Peserta Didik Indonesia Tahun 2000 – 2015

Masalah pendidikan selanjutnya adalah mengenai krisis karakter. Karakter merupakan salah satu aspek kepribadian manusia yang menunjukkan identitas serta jati diri bagi setiap individu. Dalam kehidupan manusia, pengembangan karakter sangat penting untuk diperhatikan karena karakter menunjuk kepada budi pekerti dan akhlak yang menentukan bagaimana setiap individu menyesuaikan dan berperilaku terhadap lingkungan di sekitarnya.

Pendidikan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada kualitas akademik saja tetapi juga pada karakter. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan PPK mengusung lima nilai utama karakter untuk ditanamkan kepada para peserta



didik. Nilai-nilai utama karakter itu adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Penanaman nilai-nilai utama itu akan dilakukan pada 3 kegiatan inti kegiatan belajar-mengajar, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Kebijakan PPK adalah dalam rangka menanggulangi krisis pendidikan karakter di Indonesia. Krisis pendidikan karakter ini berdampak pada maraknya permasalahan yang bermuara pada ketiadaan karakter positif pada peserta didik. Data dari KPAI menunjukkan bahwa masih banyak kasus anak berhadapan dengan hukum, yaitu hingga 7.698 kasus sejak tahun 2011-2016, yang dianggap sebagai akibat dari dekadensi moral (KPAI, 2017). Di samping itu, berbagai macam fenomena kenakalan remaja dan pelajar, seperti tawuran dan bentuk kekerasan lain, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, kecurangan dalam ujian, perundungan, dan ketidakpedulian terhadap lingkungan, juga dianggap bersumber dari absennya nilai-nilai karakter positif pada para remaja dan pelajar tersebut.

Penguatan pendidikan karakter menuntut peserta didik untuk selama mungkin terpapar dengan penerapan lima nilai utama karakter tersebut. Kenyataannya, ketika kegiatan belajar-mengajar di sekolah hanya diselenggarakan selama lebih-

kurang lima hingga enam jam sehari, hanya selama itulah peserta didik terpapar dengan penerapan nilai-nilai PPK tersebut. Selebihnya, peserta didik menghadapi berbagai macam fenomena yang mencerminkan nilai-nilai yang beragam pula, yang tidak selamanya sesuai dengan nilai-nilai PPK, atau bahkan berlawanan. Sebagai contoh adalah ketika berada di dalam angkutan umum dalam perjalanan pulang dari sekolah, seorang peserta didik sangat mungkin menyaksikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengendara kendaraan bermotor, yang mana hal itu merupakan contoh buruk dalam PPK. Pemerintah memang telah merencanakan keterlibatan pihak-pihak di luar sekolah untuk menyukseskan PPK, misalnya pemerintah daerah, komite sekolah, dan penggiat pendidikan tetapi banyak sekali keterbatasan dalam hal pengawasan peserta didik di luar jam sekolah.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, diperlukan kebijakan agar aksesibilitas memperoleh pendidikan lebih mudah, kualitas pendidikan meningkat, dan peningkatan karakter. Sekolah berasrama adalah model pendidikan yang dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan ketiga masalah tersebut. Sekolah berasrama menuntut peserta didik untuk tinggal di asrama dan berinteraksi secara lebih lama dengan para pengajar dan peserta didik lain. Keberadaan

asrama di sekolah dapat mengatasi masalah aksesibilitas pendidikan yang rendah. Selain itu, peranan sekolah berasrama juga dapat sebagai peningkatan mutu dan karakter siswa. Hal ini dikarenakan model pengasuhannya yang terintegrasi dengan nilai-nilai kehidupan. Dalam proses pendidikan seperti itu, peserta didik tidak hanya mendapatkan kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan emosional dan spiritual.

Sejumlah inisiatif pengembangan sekolah berasrama untuk menjawab berbagai persoalan di atas telah banyak dilakukan. Namun demikian, sekolah-sekolah asrama tersebut berkembang tanpa acuan standar penyelenggaraan yang jelas sehingga jatuh dan bangunya sekolah-sekolah tersebut sering kali lepas dari pantauan pemerintah. Sistem pendidikan nasional hanya menjangkau penyelenggaraan pendidikan formal di dalam kelas saja dan belum menjangkau proses pendidikan sekolah berasrama secara lebih menyeluruh. Padahal mengingat potensinya, model sekolah berasrama yang baik perlu dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan yang tidak cukup diselesaikan oleh sistem sekolah reguler.

Mengingat urgensi keberadaan sekolah berasrama yang tidak diimbangi dengan keberadaan peraturan-peraturan terkait, maka diperlukan suatu kajian mengenai capaian pengelolaan

sekolah berasrama dalam mengatasi masalah akses, mutu dan karakter dalam upaya penyusunan pedoman peraturan pengelolaan sekolah berasrama.

## **B. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi nilai dan capaian pengelolaan Sekolah Berasrama.
2. Memberikan arah dan ruang lingkup kebijakan dalam upaya penyusunan peraturan pengelolaan Sekolah Berasrama.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini fokus pada sekolah berasrama yang telah diselenggarakan hingga tahun 2016 dengan karakteristik tertentu seperti: sekolah akses, sekolah unggulan, sekolah kejuruan bidang spesifik, sekolah ketarunaan, dan sekolah keolahragaan. Adapun alasan pemilihannya adalah untuk mengetahui capaian pengelolaan pada masing-masing sekolah berasrama tersebut.

#### **D. Hasil yang Diharapkan**

Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian adalah berupa nilai dan capaian pengelolaan Sekolah Berasrama yang dapat digunakan sebagai:

1. Dasar konseptual dalam penyusunan rancangan peraturan tentang pengelolaan sekolah berasrama;
2. Landasan pemikiran bagi pemerintah, masyarakat dan pemerhati pendidikan terkait kebijakan pengelolaan sekolah berasrama;
3. Rujukan semua pihak, DPR, pemerintah, serta pihak-pihak terkait kebijakan pengelolaan sekolah berasrama.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Asrama adalah suatu tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok umumnya murid-murid sekolah. Asrama biasanya merupakan sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya. Para penghuninya menginap di asrama untuk jangka waktu yang lebih lama daripada di hotel maupun di losmen. Alasan untuk memilih mengkhuni sebuah asrama bisa berupa tempat tinggal asal sang penghuni yang terlalu jauh, maupun untuk biayanya yang terbilang lebih murah dibandingkan untuk penginapan lain, misalnya apartemen. Selain untuk menampung murid-murid, asrama juga sering ditempati peserta suatu pesta olahraga.

Alfin Toffler dalam Kusmintardjo (1992:1), memberikan batasan asrama sekolah (*school-house*) suatu tempat tinggal bagi anak-anak di mana mereka diberi pengajaran atau bersekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asrama dapat diartikan sebagai bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang yang bersifat homogen. Homogen di sini

berarti memiliki salah satu karakteristik yang sama, misalnya asrama peserta didik.

Dengan demikian, pada dasarnya asrama sekolah dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana para peserta didik bertempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif tetap bersama dengan guru sebagai pengasuhnya yang memberikan bantuan kepada para peserta didik dalam proses pengembangan pribadinya melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya. Pengembangan pribadi di sini disesuaikan dengan bidang atau profesi yang sedang ditempuh di sekolah yang bersangkutan.

Asrama merupakan tempat tinggal bagi peserta didik dan pembina yang melakukan proses pembelajaran selama 24 jam atau yang biasa disebut sekolah berasrama. Sekolah Berasrama dapat diartikan sebagai sekolah yang menyediakan asrama untuk tempat tinggal sekaligus tempat mendidik peserta didik-peserta didiknya selama kurun waktu tertentu. Suatu sekolah yang memiliki manajemen sekolah berasrama biasanya mewajibkan kepada peserta didik-peserta didiknya untuk tinggal dan dididik di asrama sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9/Permen/M/2008 Pasal 1, Lembaga Pendidikan Berasrama adalah penyelenggara

pendidikan menengah yang berbentuk pendidikan umum, kejuruan dan/atau keagamaan atau pendidikan terpadu (pendidikan umum dengan pendidikan agama, atau pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan atau pendidikan agama dengan pendidikan kejuruan) yang dalam proses pembelajarannya mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal di asrama.

Di lingkungan sekolah, para peserta didik dapat melakukan interaksi dengan sesama peserta didik, bahkan berinteraksi dengan para guru setiap saat. Contoh yang baik dapat mereka saksikan langsung di lingkungan mereka tanpa tertunda. Dengan demikian, pendidikan kognisi, afektif, dan psikomotor peserta didik dapat terlatih lebih baik dan optimal. Sekolah berasrama yang baik dijaga dengan ketat agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan sistem pendidikan atau dengan ciri khas suatu sekolah berasrama. Dengan demikian peserta didik terlindungi dari hal-hal yang negatif seperti merokok, narkoba, tayangan film atau sinetron yang tidak mendidik dan sebagainya. Di sekolah dengan sistem ini, para peserta didik mendapatkan pendidikan dengan kuantitas dan kualitas yang berada di atas rata-rata pendidikan dengan sistem konvensional.



Adapun beberapa manfaat dibentuknya sekolah berasrama (Lestari, 2014), antara lain:

1. Model pendidikan di sekolah berasrama merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan karakter peserta didik. Model ini bukan hal baru, karena sudah lama dipraktikkan di pesantren dan sekolah ketarunaan. Seorang peserta didik atau santri tidak hanya belajar secara kognitif, melainkan juga afektif dan psikomotor. Belajar afektif adalah mengisi otak peserta didik/santri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, dengan cara melatih kecerdasan anak. Sementara menghadapi era modernisme seperti sekarang ini, otak peserta didik tidak lagi cukup dengan dipenuhi ilmu pengetahuan, melainkan perlu keterampilan dan kecerdasan agar memiliki hati nurani luhur. Sebab, pada kenyataannya, dalam menghadapi kehidupan, manusia menyelesaikan masalah tidak cukup dengan kecerdasan intelektual, melainkan perlu kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). Mengajarkan kecerdasan emosional dan spiritual tidak cukup dilakukan secara kognitif, sebagaimana mengajarkan kecerdasan intelektual. Dalam hal ini diperlukan proses internalisasi dari berbagai pengertian yang ada dalam

rasio ke dalam hati sanubari. Salah satu cara terbaik mengajarkan dunia afektif adalah pemberian teladan dan contoh dari para pemimpin dan orang-orang yang berpengaruh di sekitar anak.

2. Sebagai salah satu metode alih pengetahuan yang efektif. Dengan mengasramakan peserta didik sepanjang 24 jam, peserta didik tidak hanya mendapatkan pelajaran secara kognitif, melainkan dapat menyaksikan langsung bagaimana perilaku ustadz, guru, dan orang-orang yang mengajarkan mereka. Para peserta didik bisa menyaksikan langsung, bahkan mengikuti pembina atau pemimpin seperti bagaimana cara shalat yang khushuk, menanamkan nilai kedisiplinan, kepedulian dan sebagainya.
3. Optimalisasi psikomotorik anak lebih optimal. Dengan otoritas dan wibawa yang dimiliki, para guru secara tidak langsung mampu mengoptimalkan psikomotorik peserta didik, baik sekadar mempraktikkan berbagai mata pelajaran dalam bentuk gerakan-gerakan motorik kasar maupun motorik lembut, maupun berbagai gerakan demi kesehatan jiwa dan psikis anak. Karena sistem sekolah berasrama mampu mengoptimalkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik,

maka sistem ini memiliki prasyarat agar para guru dan pengelola sekolah siap mewakafkan dirinya selama 24 jam. Selama siang dan malam ini, mereka melakukan proses pendidikan, baik ilmu pengetahuan, maupun memberikan contoh bagaimana mengamalkan berbagai ilmu yang diajarkan tersebut.

4. Dengan adanya sekolah berasrama, keinginan orang tua mendapatkan sekolah berkualitas didukung tempat tinggal yang layak dan terjangkau jaraknya bagi anak-anaknya dapat terpenuhi. Selain adanya pengawasan 24 jam, menyekolahkan anak di sekolah berasrama juga bisa meningkatkan persaudaraan yang kental di antara anak-anak, menciptakan hubungan yang baik antara guru dan murid.

Terdapat berbagai macam pandangan yang mempengaruhi bagaimana sekolah berasrama dijalankan. Sehubungan dengan serangkaian aspek terukur yang terikat, analisis didasarkan pada informasi dari sistem ekologi, perkembangan positif generasi muda, kegiatan ekstrakurikuler, serta perspektif dan teori kedekatan. Perlu diingat bahwa teori-teori ini tidak secara langsung membahas sekolah berasrama dalam pembentukannya, namun teori-teori tersebut relevan dengan proses kontekstual dan psikologis terkait sekolah berasrama.

## **1. Kerangka Sistem Ekologi dan Perkembangan Positif Generasi Muda**

Teori sistem ekologi Bronfenbrenner dalam Lestari (2014) menekankan peran penting faktor-faktor lingkungan dalam perkembangan manusia. Ide utama Bronfenbrenner didasarkan pada premis perkembangan manusia merefleksikan pengaruh beberapa sistem lingkungan yang terdiri dari lapisan-lapisan mikro maupun makro, sebagai konteks perkembangan. Sebagaimana akan dikemukakan di bahasan berikutnya, lapisan-lapisan ini memiliki relevansi dengan konteks dan proses sekolah asrama. Model ini diawali dengan individu berada dalam lapisan utama mikrosistem. Mikrosistem tersebut adalah pola kegiatan, peran sosial, dan hubungan interpersonal yang secara langsung mempengaruhi perkembangan individu. Contohnya, untuk para peserta didik asrama, aspek ini mungkin meliputi teman sebaya di asrama dan sekolah. Lapisan berikutnya meliputi mesosistem, yang terdiri dari hubungan dan proses antara dua atau lebih situasi/kondisi di mana individu terkait berada di dalamnya. Misalnya adalah hubungan antara rumah

dan asrama. Lapisan selanjutnya yaitu exosistem, meliputi hubungan dan proses yang terjadi antara dua atau lebih situasi/kondisi. Dalam konteks sekolah asrama, exosistem dapat meliputi rumah-rumah asrama lain dalam kompleks sekolah, yang membentuk lingkungan lokal di mana kegiatan atau kejadian di rumah yang satu dapat mempengaruhi individu di rumah lainnya. Bronfenbrenner menyebut lapisan berikutnya sebagai makrosistem, terdiri dari pola menyeluruh mikro-, meso-, dan exosistem. Keseluruhan sistem asrama di sekolah dapat menjadi representasi makrosistem. Lapisan terakhir model ini adalah kronosistem, mencakup waktu dan transisi dalam hidup seorang individu. Untuk peserta didik, ini dapat merepresentasikan perjalanan waktu dalam tahun akademis.

Kesimpulannya, di berbagai tingkat ekologi pendidikan maupun ranah tempat tinggal, rumah asrama dan sekolah asrama merepresentasikan konteks yang berbeda dari lingkungan rumah/keluarga. Perkembangan positif generasi muda adalah perspektif lain yang mengangkat pentingnya hubungan antara individu dan situasi ekologi mereka, serta pentingnya

hubungan tersebut sebagai dasar perkembangan generasi muda. Kerangka perkembangan positif generasi muda telah dikemukakan sebagai suatu perspektif yang menyanggah kurangnya orientasi pada anak-anak muda. Kerangka ini menunjukkan bahwa seluruh generasi muda memiliki kekuatan (atau potensi untuk mewujudkan kekuatan mereka) dan kekuatan ini dikembangkan dengan menyelaraskan para generasi muda dengan peluang perkembangan diri yang ada dalam ekologi mereka.

## **2. Perspektif Ekstrakurikuler**

Perspektif mengenai kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menjelaskan kemungkinan efek sekolah berasrama. Kegiatan ekstrakurikuler didefinisikan sebagai kegiatan di luar kelas dalam bentuk apapun yang menyerap waktu, perhatian, dan energi peserta didik (Marsh & Kleitman, 2002). Jika dilihat dari persepsi yang luas ini, asrama dapat dilihat sebagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Meskipun temuan mengenai efek kegiatan ekstrakurikuler beragam, penelitian mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis di sekolah menunjukkan hasil yang lebih jelas yaitu cenderung efek positif (Marsh & Kleitman,

2002). Model identifikasi/komitmen kegiatan ekstrakurikuler mengatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler berbasis sekolah memiliki potensi “meningkatkan identifikasi, keterlibatan, dan komitmen pada sekolah dengan menguatkan definisi hasil akademis maupun non-akademis” (Marsh & Kleitman, 2002, p. 471).

Model *zero-sum* adalah model yang menyanggah model identifikasi/komitmen yang meyakini bahwa waktu yang dihabiskan melakukan kegiatan ekstrakurikuler adalah waktu yang seharusnya dapat dipakai melakukan kegiatan perkembangan, mengakibatkan berkurangnya hasil yang beragam (Marsh & Kleitman, 2002). Hasil penelitian empiris mendukung hipotesis identifikasi/komitmen dan menemukan bahwa peserta didik yang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler berbasis di sekolah lebih cenderung untuk membentuk afiliasi dengan sekolah dan menunjukkan hasil positif. Karena itu, afiliasi pada lokasi spesifik (contohnya, sekolah) memperkuat identifikasi dan komitmen peserta didik pada lokasi tersebut, sehingga membawa pada hasil positif bagi peserta didik terkait. Karena sekolah

berasrama memperluas dan menguatkan kegiatan peserta didik di sekolah, hal itu dapat dikaitkan dengan hasil positif, dan ini konsisten dengan efek kegiatan ekstrakurikuler berbasis sekolah (Marsh & Kleitman, 2002).

### **3. Perspektif Kedekatan**

Teori kedekatan dan pola asuh memusatkan posisi peran orang tua atau pengasuh di rumah pada perkembangan akademis dan non-akademis generasi muda. Peserta didik yang diasuh oleh orang tua dan berada di rumah setiap hari akan membentuk kedekatan yang diperlukan untuk perkembangan yang sehat. Dalam konteks ini, sekolah berasrama dapat membuat jarak antara generasi muda dengan pengaruh penting dalam hidup mereka tersebut dan menyebabkan efek negatif tergantung dari lamanya hari peserta didik tersebut berada pada pengaruh kondisi rumah—ini konsisten dengan beberapa penelitian yang menunjukkan efek negatif asrama baik secara personal maupun interpersonal. Namun, jika dilihat dari sudut pandang tersebut, sekolah berasrama juga mungkin dapat menjauhkan peserta didik dari kemungkinan pola asuh negatif dan lingkungan



rumah/tetangga yang tidak sehat. Dalam hal ini, pada tingkat agregat, penelitian mungkin akan menemukan efek signifikan yang sedikit atau temuan yang beragam. Lebih jauh lagi, berdasarkan penelitian yang menunjukkan motivasi dan keterlibatan positif dengan guru, tinggal di asrama dapat membentuk suatu kedekatan dengan sosok orang dewasa yang pro-sosial sehingga meningkatkan kesejahteraan akademis maupun non-akademis. Karenanya, penelitian saat ini merupakan kesempatan membandingkan peserta didik yang tinggal di asrama dengan peserta didik yang tidak, yang masing-masing memiliki jenis dan jumlah interaksi yang berbeda dengan orang tua, pengasuh, serta guru.

## **B. Kajian Empiris (Analisis Data Sekunder)**

### **1. Sekolah Berasrama di Luar Negeri**

Kehadiran sekolah berasrama telah memberikan alternatif pendidikan bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Seiring dengan pesatnya modernitas, dimana orang tua tidak hanya suami yang bekerja tapi juga istri bekerja sehingga anak tidak lagi terkontrol dengan baik, maka sekolah berasrama

adalah tempat terbaik untuk menitipkan anak-anak mereka karena dapat terjamin baik makanannya, kesehatannya, keamanannya, sosialnya dan yang paling penting adalah pendidikannya. Selain itu, polusi sosial dan dekadensi moral yang sekarang ini melanda lingkungan kehidupan masyarakat seperti pergaulan bebas, narkoba, tawuran pelajar, pengaruh media dan pergaulan remaja yang menyimpang lainnya ikut mendorong banyak orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah berasrama.

Banyaknya manfaat tersebut, keberadaan sekolah berasrama banyak ditemukan di negara lain seperti Perancis, Amerika, Australia, dan negara lainnya.

#### **a. Perancis**

Berdasarkan laporan perkembangan sekolah berasrama di Perancis oleh Atdikbud Paris yang bernama Putra (2017), sekolah asrama di Perancis saat ini tidak lagi menebar rasa takut. Mereka yang mengikuti pendidikan di sana pun tidak lagi dianggap sebagai orang buangan. Sekolah asrama tidak lagi merupakan sebuah institusi yang penuh kekerasan. Setidaknya citra itulah yang terus dikenalkan oleh Pemerintah Perancis yang sejak

awal abad ke-21 ini semakin gencar mengampanyekan model pendidikan seperti ini. “*Plan de relance de l'internat scolaire public*” yang diedarkan pada tanggal 31 Juli 2000 merupakan awal dari serangkaian pengembangan pendidikan sekolah asrama di Perancis.

Praktek sekolah asrama di Perancis memiliki sejarah panjang. Sekolah asrama yang diselenggarakan oleh negara bisa ditelusuri sampai abad ke-19, seiring dengan berdirinya negara Perancis itu sendiri. Perkembangan dunia pendidikan saat itu sejalan dengan perkembangan sekolah asrama itu sendiri. Pada saat itu, penyelenggaraan sekolah sebagian besar dilakukan wilayah perkotaan, sementara masyarakat Perancis umumnya masih tinggal di pedesaan. Itulah kenapa penyelenggaraan sekolah juga diiringi dengan penyediaan asrama, untuk menjawab persoalan geografis yang dialami para peserta didik yang umumnya berasal dari pedesaan. Sementara itu, sekolah asrama yang diselenggarakan oleh pihak swasta memiliki tradisi yang jauh lebih tua. Tradisi pendidikan

jesuit sebelum abad ke-19 merupakan pendidikan asrama. Terlepas dari sekolah asrama negeri maupun swasta, pada abad ke-19, mereka yang memiliki akses ke pendidikan ini sangatlah terbatas. Hanya mereka yang berasal dari kalangan berada saja yang memiliki akses terhadap pendidikan ini, sebab sekolah asrama cukup mahal dan anak-anak muda yang sekolah di asrama mengharuskan tinggal jauh dari keluarga, sehingga keluarga itu kehilangan potensi untuk memperoleh pendapatan dari tenaga si anak yang umumnya dipakai untuk mengerjakan lahan pertanian.

Perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah asrama ini adalah setelah tahun 1968. Revolusi sosial yang mengubah tatanan masyarakat juga berimplikasi terhadap cara bagaimana masyarakat memandang sekolah asrama. Semangat yang dibawa pada saat itu adalah penghargaan yang cukup tinggi terhadap individualitas, sesuatu yang absen dalam proses pendidikan di asrama. Selain itu, perubahan peran orang tua juga cukup memberi dampak

dengan adanya kecenderungan bahwa orang tua ingin selalu tinggal berdekatan dengan anak-anaknya sebisa mungkin. Di luar alasan sosiologis tadi, kenyataan bahwa pemerintah sudah melakukan pembangunan sekolah-sekolah di sekitar tempat masyarakat tinggal membuat sekolah asrama jadi tidak lagi menjadi satu satunya pilihan untuk memperoleh pendidikan.

Penurunan angka peserta didik ini dapat dilihat dari persentasi jumlah peserta didik yang bersekolah di asrama. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 1970/71, terdapat 19% peserta didik terdaftar di sekolah asrama negeri dan 9% di sekolah asrama swasta, sementara itu pada tahun 1994/95, terdapat 7% di sekolah asrama negeri dan 1% di sekolah swasta. Dari sumber yang sama disebutkan pula sebuah perubahan pola yang cukup signifikan terkait usia peserta didik yang mengikuti program pendidikan di sekolah asrama. Pada tahun 60-an, mereka yang bersekolah di asrama sebagian besar berusia 12 sampai 15 tahun, sementara itu pada tahun 90-an, umumnya mereka yang berusia 16 sampai 18 tahunlah yang

mengikuti model pendidikan seperti ini. Untuk kelompok usia yang terakhir ini, sebagai ilustrasi, pada tahun 60-an terdapat 39% dari total peserta didik yang sekolah di asrama, sementara pada tahun 90-an terdapat 77%.

Terlepas dari melekatnya citra buruk di kalangan masyarakat Perancis, sekolah asrama masih dianggap sebagai model pendidikan yang baik. Permintaan akan sekolah asrama pun mengalami peningkatan, seperti disebutkan dalam surat edaran pemerintah tahun 2000. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (*Collège*) angkanya memang sedikit (hanya 0,5% dari total peserta didik yang terdaftar di tingkat ini). Angka yang meningkat justru ada di tingkat Sekolah Menengah Atas (*Lycée*). Sayangnya, sebagaimana juga diungkapkan dalam surat itu, ketersediaan sekolah asrama tidak sebanding dengan permintaan yang terus meningkat. Itulah yang membuat pemerintah kemudian menyebarkan edaran supaya jumlah sekolah asrama ditingkatkan.

Sebagai gambaran, berikut data statistik terkait kondisi aktual sekolah asrama di Perancis ketika pemerintah merencanakan peningkatan model pendidikan ini.

Tabel 2.1 Data Sekolah Berasrama di Perancis

	Jumlah Total Bangunan		Dengan Asrama		Proporsi Institusi Yang Menyelenggarakan Sekolah Asrama		Kapasitas Total Asrama		Jumlah Yang Terisi	
	1998/1999	2000/2001	1998/1999	2000/2001	1998/1999	2000/2001	1998/1999	2000/2001	1998/1999	2000/2001
<b>Tahun</b>										
<i>Collège</i>	4.569	4.666	213	251	4,66%	5,4%	13.657	16.972	55%	51,2%
<i>Lycées</i>	844	929	386	456	45,73%	49,1%	70.646	89.501	77,6%	78,3%
<i>Lycées Professionnels</i>	704	760	337	397	47,87%	52,2%	50.679	63.126	77,1%	73,2%
<i>Cité Scolaires</i>	432	535	311	398	71,99%	73%	63.144	80.732	91,8%	72,6%
<b>Total</b>	<b>6.549</b>	<b>6.900</b>	<b>1.274</b>	<b>1.502</b>	<b>19,04%</b>	<b>21,8%</b>	<b>198.126</b>	<b>250.331</b>	<b>80,4%</b>	<b>73,3%</b>

Sumber: Putra (2017).



Jumlah peserta didik yang mengikuti sekolah asrama masih sedikit, dan karenanya jumlah kuota yang tersedia pun tidak terisi semuanya. Demikian, surat edaran tahun 2000 ini pun memiliki nilai yang sangat penting dalam pengembangan sekolah asrama di Perancis. Surat edaran tersebut memberi penekanan untuk membuat pusat informasi terkait sekolah asrama di departemen-departemen (kabupaten dan kotamadya) seluruh Perancis. Selain itu, penekanan juga diberikan kepada visi bahwa Sekolah Asrama merupakan model pendidikan komprehensif, dan tidak hanya terkait dengan penyediaan tempat menginap.

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sub-urban, pemerintah juga merujuk kepada model sekolah asrama sebagai solusi untuk hal ini. Hal itu tampak dalam surat edaran pemerintah tanggal 28 April 2009 “*Plan espoir banlieu*”, yang dengan tegas menyebutkan kesuksesan “*l’internat d’excellent*”, sebuah program asrama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu prestasi pemerintah di

tahun 2008 adalah diluncurkannya situs internet yang memuat *database* terkait sekolah asrama yang ada di Perancis (Putra, 2017).

Gagasan mengenai “*internat d’excellent*” ini kemudian semakin besar gaungnya. Model sekolah asrama ini dipercaya bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak. Sekolah asrama dianggap sebagai cara untuk meningkatkan keberhasilan peserta didik dalam bidang akademis maupun dalam kehidupan sosial. Menurut Putra (2017), setidaknya itulah yang bisa dibaca dari buletin kementriaan pendidikan tahun 2015. Dari catatan itu disa diketahui bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan diterimanya peserta didik di sekolah asrama:

- 1) Tingkat *collège* (setara SMP) atau sekolah kejuruan.
- 2) Kriteria geografis: mereka yang tinggal di daerah terpencil, yang tinggal di distrik yang secara politik mendapat prioritas pendidikan, dan para peserta didik yang rumah orang tuanya jauh dari institusi pendidikan

tempatnya bersekolah harus mendapat prioritas diterima di sekolah asrama.

- 3) Kriteria sosial: para peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang memiliki perhatian terhadap pendidikan yang karenanya kemudian dukungan untuk belajar di rumah menjadi sangat kurang, begitu pula yang berada di lingkungan sosial yang kurang mendukung, harus juga mendapat prioritas.
- 4) Kriteria keluarga: peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak utuh.
- 5) Kriteria kesetaraan: keseimbangan antara murid laki-laki dan perempuan harus terpenuhi.
- 6) Kriteria akademis: semua peserta didik yang atas keinginan sendiri dan keluarganya ingin mengikuti pendidikan di sekolah asrama.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 jumlah sekolah asrama negeri mengalami peningkatan menjadi 1634. Dari 5,7 juta peserta didik tingkat *collège* dan *lycée*, 244.000 mengikuti pendidikan di sekolah asrama; 180 415 di antaranya berada di sekolah negeri dan

63.221 berada di asrama yang diselenggarakan pihak swasta. Kuota yang tersedia untuk sekolah asrama negeri juga meningkat menjadi 229 562 yang terdistribusi sebagai berikut: *collège* memiliki 11 973 tempat, *lycée professionnel* memiliki 56.118 tempat, dan *lycée* umum memiliki 161 471 tempat (Putra, 2017).

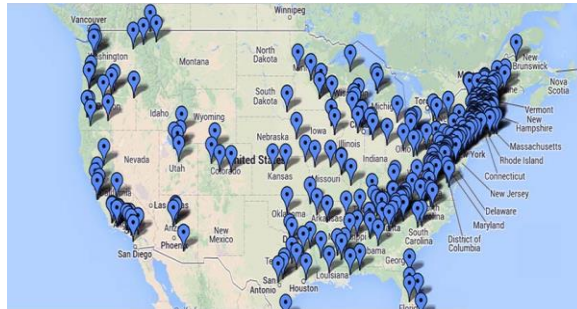
Pada tahun 2016, pemerintah kemudian mencanangkan program “*Internat de la réussite pour tous*” (Sekolah asrama untuk keberhasilan semua). Program ini untuk melengkapi, menguatkan, dan mempertajam program penyelenggaraan sekolah asrama. Pada tahun-tahun sebelumnya sekolah asrama lebih banyak memusatkan perhatian kepada para peserta didik yang betul-betul membutuhkan, dengan berbagai latar belakang permasalahannya. Melalui “*Internat de la réussite pour tous*”, sekolah asrama ditekankan kepada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik dan juga sebagai cara untuk memerangi ketidaksetaraan prestasi akademik peserta didik

berdasarkan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda.

Terkait perbedaan latar belakang sosial ekonomi peserta didik yang berakibat pada ketidaksetaraan prestasi akademik mereka memang merupakan pekerjaan rumah utama persoalan pendidikan di Perancis. Hasil PISA yang diumumkan pada akhir tahun 2016 lalu menunjukkan bahwa kesenjangan prestasi antara peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan kaya sangatlah jauh. Itulah kenapa pemerintah Perancis tampak optimis bahwa dengan adanya sekolah asrama kesenjangan ini bisa teratasi.

#### **b. Amerika Serikat**

Berdasarkan laporan sekolah berasrama di Amerika Serikat yang bersumber dari Ismunandar (2017), di AS terdapat 192 sekolah *boarding* yang menampung sekitar 81 ribu peserta didik (0,5% dari 50 juta peserta didik TK hingga Sekolah Menengah Atas), rata-rata jumlah peserta didik per sekolah adalah 417. Distribusi posisi sekolah di AS diperlihatkan di bawah ini.



Gambar 2.1 Distribusi Posisi Sekolah di AS

Sebagian besar sekolah ini adalah swasta, dan sekitar 30% peserta didik mendapat bantuan (rata-rata bantuan \$23,400 per peserta didik per tahun). Rata-rata biaya sekolah adalah \$51,000 per peserta didik per tahun. Di sekolah *boarding* ini persentase peserta didik internasional adalah 14,3%. Ukuran kelas rata-rata adalah 12, dengan nisbah peserta didik ke guru adalah 8:1.

Jenis Sekolah Berasrama:

- 1) Untuk persiapan pendidikan tinggi (PT), sebagian besar sekolah berasrama adalah untuk persiapan PT. Beberapa sekolah berasrama juga menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus. Beberapa sekolah berasrama untuk persiapan PT memiliki ciri-

ciri khusus tambahan: khusus pria (27 sekolah), khusus wanita (20 sekolah), menekankan disiplin militer (10 sekolah), mempunyai kekhususan kurikulum: misalnya isu lingkungan, seni, dan sebagainya (8 sekolah), berafiliasi pada agama (73 sekolah).

- 2) Junior sekolah berasrama, yang menerima peserta didik di bawah kelas 8. Sangat sedikit sekolah berasrama jenis ini.
- 3) Sekolah berasrama untuk terapi, sekolah *boarding* yang diperuntukkan untuk *troubled teen* dan *struggling teen*.

Mulai akhir abad 19 di AS pernah ada usaha untuk memberikan sekolah *boarding* bagi anak-anak Indian, dilakukan oleh *missionaries* dengan dana pemerintah, dengan maksud untuk mengajari berbagai cara hidup Eropa, bahkan dengan dorongan pada para peserta didik untuk meninggalkan identitas dan budaya asli mereka. Hal ini menimbulkan berbagai tentangan sepanjang sejarah sekolah tersebut. Sebagian besar sekolah-sekolah ini telah tutup.

Keunggulan sekolah berasrama yaitu:

- 1) Ukuran kelas yang lebih kecil daripada di sekolah umum, 30 banding 10.
- 2) Kesempatan yang lebih besar untuk belajar menjadi manusia dewasa.
- 3) Perpustakaan dan dukungan sumber belajar yang baik.
- 4) Teman di sekolah yang bersemangat dan berniat kuat melanjutkan studi di PT.
- 5) Pilihan mata pelajaran yang luas.
- 6) Program dan fasilitas belajar seni yang baik.
- 7) Program dan fasilitas belajar olahraga yang baik.
- 8) Guru yang baik dan berdedikasi.

**c. Australia**

Menurut informasi yang diberikan oleh Kedubes RI tahun 2016 tentang laporan *boarding school* di Australia sebagai bahan masukan program sekolah berasrama di Indonesia, keberadaan sekolah berasrama di Australia sudah sangat umum dan terdapat di semua negara bagian di Australia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *The Australian Sekolah Berasramas Association*, pada tahun 2016 jumlah sekolah berasrama yang



tersebar di seluruh negara bagian di Australia mencapai 184 sekolah berasrama dengan jumlah peserta didik sebanyak 27.430 peserta didik. Jumlah ini mengalami peningkatan sejak tahun 2013 setelah selama 20 tahun sebelumnya terus mengalami penurunan.

Sekolah berasrama ini sangat ideal bagi peserta didik lokal maupun internasional karena dapat mendukung dan mengembangkan potensi akademik peserta didik dan juga memberikan dukungan dan bimbingan sosial, psikologi, emosi, dan pengembangan spiritual. Berdasarkan masa tinggal, ada dua tipe sekolah berasrama di Australia yaitu *semi sekolah berasrama* di mana peserta didik menghabiskan waktunya sebagian di sekolah dan sebagian lagi di sekolah berasrama, yang mana biasanya pada akhir pekan peserta didik pulang ke rumah. Tipe yang kedua adalah *full sekolah berasrama* di mana peserta didik tinggal sepenuhnya dalam menempuh pendidikan di sekolah dan di luar jam sekolah tinggal dan melakukan aktivitasnya di asrama sekolah. Di samping itu terdapat juga sekolah berasrama

husus untuk peserta didik laki-laki, peserta didik perempuan dan campuran.

Berdasarkan sumber pembiayaannya, sekolah berasrama di Australia dibagi menjadi 2 yaitu sekolah berasrama umum yang pembiayaannya berasal dari para orang tua peserta didik dan sekolah berasrama khusus untuk masyarakat marjinal terpencil (Aborigin dan Torres Straits Islander) yang pembiayaannya sebagian besar didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Besaran biaya sekolah berasrama bervariasi tergantung tipe sekolah berasramanya (*full sekolah berasrama* atau *semi sekolah berasrama*), lokasi sekolah berasrama (di kota atau daerah pinggiran), reputasi sekolah dan asal peserta didik (peserta didik lokal atau peserta didik internasional). Sebagai gambaran untuk sekolah berasrama di pinggiran diperoleh biaya per tahunnya untuk peserta didik kelas 7 sampai kelas 12 berkisar antara AUD \$18.000 (setara dengan Rp180 juta) per peserta didik per tahun (meliputi *tuition fee* dan biaya asrama). Selanjutnya biaya sekolah berasrama yang berada

di kota besar mencapai AUD \$24.000 - \$28.000 per peserta didik per tahun (meliputi *tuition fee* dan biaya asrama), sedangkan untuk sekolah berasrama yang memiliki reputasi biayanya mencapai \$30.000 - \$39.000 per peserta didik per tahunnya. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik internasional untuk masuk sekolah berasrama lebih mahal daripada peserta didik lokal, dikarenakan ada komponen *international fee*. Biaya sekolah berasrama untuk peserta didik internasional di kota besar seperti Sydney untuk kelas 7-12 mencapai AUD \$47.800 (meliputi *tuition fee* dan biaya asrama), sedangkan untuk sekolah yang memiliki reputasi di kota Melbourne biayanya mencapai \$67.500 - \$69.000 per peserta didik per tahun. Melihat mahalnya biaya sekolah berasrama, khusus untuk peserta didik berprestasi diberikan beapeserta didik oleh pemerintah dalam bentuk *tuition fee* dan biaya asrama.

Sekolah berasrama di Australia umumnya memiliki beberapa bangunan asrama dengan dua tipe ruang tidur, yaitu ruang tidur individu dan

ruang tidur bersama. Di samping ruang tidur, bangunan asrama juga dilengkapi dengan ruang besar untuk kegiatan bersama seperti ruang pertemuan, ruang permainan, ruang musik, ruang komputer, dapur, dan area aktivitas di luar. Bagi peserta didik yang tinggal di asrama sekolah disediakan makanan dengan menu lengkap yang ditentukan menunya oleh *Student Food Forum* yang secara berkala melakukan konsultasi sehingga setiap 4 minggu sekali terjadi rotasi jenis menu yang disajikan. Di setiap asrama diberikan fasilitas bagi peserta didik untuk melakukan pertemuan dengan pengurus asrama, bantuan penyelesaian pekerjaan rumah dan bimbingan belajar sesuai jam sekolah. Sesuai jam sekolah dan juga pada akhir pekan kegiatan diisi dengan rekreasi mulai dari melakukan kegiatan olahraga, kerajinan tangan, memasak, dan lainnya yang dilakukan oleh relawan dari berbagai organisasi masyarakat. Di samping fasilitas yang telah diuraikan di atas, sekolah berasrama di Australia juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan kebersihan yang sangat memadai berupa klinik yang dilengkapi dengan keberadaan perawat yang

ditunjuk oleh dokter dan dokter gigi. Jika peserta didik mengalami sakit dan tidak dapat ditangani di klinik sekolah, maka peserta didik akan dirujuk ke rumah sakit terdekat.

## **2. Sekolah Berasrama di Indonesia**

### **a. Bentuk-Bentuk Sekolah Berasrama**

Sekolah berasrama di Indonesia memiliki bentuk dan karakteristik yang beragam. Secara umum, terdapat dua bentuk sekolah berasrama: sekolah berasrama keagamaan dan sekolah berasrama umum. Masing-masing memiliki variasi yang juga beragam. Meskipun Indonesia secara resmi mengakui enam agama, namun sekolah berasrama keagamaan di Indonesia didominasi oleh sekolah-sekolah berasrama keislaman atau yang secara populer disebut pesantren. Sementara itu, sekolah-sekolah berasrama umum adalah sistem sekolah reguler dengan tambahan asrama. Meski bersifat non-keagamaan, banyak dari sekolah-sekolah berasrama umum ini yang berorientasi dan memiliki identitas keagamaan. Berikut ini akan diuraikan beberapa bentuk sekolah berasrama di Indonesia.

## **1) Pesantren: Tradisional dan Modern**

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua di Indonesia yang masih bertahan hingga sekarang. Dari sistem pendidikannya, pesantren bisa dibagi menjadi dua: tradisional dan modern. Awalnya, sistem pendidikan pesantren sangat sederhana di mana kiai dan beberapa guru mengajarkan materi yang sangat terbatas, sesuai dengan kitab-kitab atau cabang-cabang keilmuan yang dikuasai oleh mereka. Oleh karena itu, para santri sering kali berpindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain jika ingin mengaji secara mendalam cabang-cabang keilmuan yang berbeda-beda. Pesantren tradisional juga tidak mengenal sistem kelas karena guru menjadi sentralnya. Para santri mendatangi guru-guru sesuai dengan materi pelajaran yang menjadi minat mereka. Lokasi belajar mengajar bisa di masjid, asrama, atau di rumah sang guru. Selain itu, pesantren tradisional umumnya dimiliki oleh keluarga kiai dan relatif mandiri secara ekonomi. Para kiai membiayai

pesantren mereka dari unit produksi yang mereka miliki seperti sawah atau kebun, sumbangan masyarakat sekitar, atau sumbangan orang tua santri.

Selain pesantren tradisional juga terdapat pesantren modern. Berbeda dari pesantren tradisional, pesantren modern menerapkan sistem pendidikan formal dengan pengajaran berbasis kelas dan memiliki struktur kurikulum yang dikembangkan secara mandiri. Selain memuat berbagai cabang keilmuan agama, kurikulumnya juga memuat mata pelajaran umum. Rekrutmen peserta didik juga dilakukan secara selektif melalui rangkaian tes baik lisan maupun tertulis. Selain itu, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi bagian dari proses pendidikan di pesantren modern ini. Berbagai fasilitas olahraga, seni, peningkatan keterampilan, dan kursus bahasa asing disediakan untuk para santri. Seperti halnya pesantren tradisional, pesantren modern juga mandiri secara ekonomi. Beberapa pesantren modern

memiliki jenis unit usaha yang lebih banyak dan dikelola secara professional untuk mendukung proses pendidikan di dalamnya. Para santri dilibatkan dalam pengelolaan berbagai unit usaha tersebut sebagai bagian dari pendidikan kewirausahaan.

Namun, seiring waktu, perbedaan antara pesantren tradisional dan modern semakin menipis. Beberapa pesantren tradisional ini juga mulai mengenalkan sistem pendidikan formal. Sekolah-sekolah formal didirikan di dalam pesantren dan waktu pengajarannya dibuat terpisah dari sistem non-formal pesantren tradisional. Pada pagi hari, para santri bersekolah di sekolah-sekolah formal, sementara pada sore hari mereka mengaji kitab kepada para kiai atau guru masing-masing.

## **2) Sekolah Berasrama Umum**

Bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, merupakan salah seorang yang meyakini bahwa pendidikan berbasis asrama adalah pendidikan ideal di Indonesia.



Meskipun sekolah-sekolah Taman Siswa yang dirintis oleh Ki Hajar bukanlah sekolah berasrama, namun dalam berbagai tulisannya, Ki Hajar mengakui pentingnya pendidikan asrama. Menurutnya, asrama adalah pendidikan berjenjang yang menganut sistem kaderisasi di mana peserta didik senior mengajar peserta didik yang lebih junior. Pada masa-masa perjuangan kemerdekaan, sistem ini merupakan alternatif dari sistem pendidikan Belanda yang kompleks dan mengkotak-kotakkan peserta didik berdasarkan kelas sosial dan ras (Radcliffe, 1971). Di dalam asrama, sebaliknya, para peserta didik bukan hanya saling membantu dalam hal akademik, terutama dalam hal senior membantu yang junior, namun juga berbaur dalam satu kesatuan komunitas yang inklusif, tidak memandang latar belakang sosial dan ekonominya.

Pada 20 Mei 1985, Taman Siswa terlibat dalam kesepakatan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendirikan institusi

pendidikan bernama Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN). Institusi ini dapat dikatakan sebagai sekolah berasrama modern non-keagamaan pertama di Indonesia. Sekolah-sekolah ini merekrut anak-anak terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat bukan hanya secara kognitif namun juga fisik. Sekolah ini menjadi inspirasi bagi lahirnya sekolah-sekolah berasrama lain di Indonesia mulai dekade 1990an. Seperti halnya Taruna Nusantara, sekolah-sekolah berasrama ini dikembangkan sebagai sekolah unggulan dengan rekrutmen peserta didik yang sangat selektif. Sekolah-sekolah ini didirikan sebagai sarana pengembangan potensi dan karakter peserta didik. Namun demikian, sekolah-sekolah umum berasrama ini pada perkembangannya bukan hanya sekolah unggulan yang melayani peserta didik-peserta didik terbaik. Beberapa yayasan swasta di wilayah-wilayah terpencil juga mengadopsi sistem asrama untuk melayani anak-anak yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Pemerintah sendiri pada tahun

2000an mulai memfasilitasi pendirian sekolah-sekolah berasrama di wilayah-wilayah terpencil di kepulauan Nusantara seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sekolah-sekolah berasrama, terutama yang dipersiapkan sebagai sekolah unggulan, memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Karakteristik ini muncul dari nilai-nilai inti yang dipedomani dan menjadi identitas sekolah-sekolah berasrama tersebut. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud, sekolah-sekolah berasrama ini dibedakan melalui tiga karakteristik nilai: keagamaan, ketarunaan, dan keilmuan.

### **3) Sekolah Berasrama Keagamaan**

Agama adalah nilai-nilai tradisional yang paling mudah digunakan untuk membentuk karakter peserta didik, menanamkan kepatuhan para anggota komunitas asrama, dan meyakinkan orang tua. Bahkan di luar negeri, sebagian besar sekolah berasrama

adalah sekolah keagamaan. Dalam masyarakat Indonesia yang religius, nilai-nilai keagamaan ini diadopsi oleh hampir sekolah berasrama. Bagian terbesar dari sekolah berasrama yang mengadopsi nilai-nilai religius ini berafiliasi pada agama tertentu. Afiliasi pada agama tertentu ini tercermin dalam seleksi peserta didik, kewajiban pelaksanaan ritual wajib keagamaan, dan pengayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan aktivitas-aktivitas keagamaan. Sekolah-sekolah berasrama yang dimiliki yayasan-yayasan keagamaan seperti Dwi Warna (Islam) dan Don Bosco (Katholik).

#### **4) Sekolah Berasrama Ketarunaan**

Ketarunaan adalah sistem pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip kemiliteran seperti kedisiplinan, kebugaran, dan keberanian. Sekolah berasrama jenis ini biasanya merupakan bentuk kerja sama antara lembaga pendidikan reguler dengan institusi militer. Dalam membentuk karakter peserta didik, sekolah-sekolah ketarunaan

mengadopsi beberapa model pelatihan dan budaya militer. Sekolah ketarunaan cukup populer di Indonesia dan merupakan perintis berkembangnya sekolah-sekolah berasrama modern. Beberapa sekolah ketarunaan di Indonesia adalah SMA Taruna Nusantara, Magelang; SMA Krida Nusantara, Bandung; SMA Taruna Nala, Malang; dan SMA Terpadu Wira Bhakti, Bone Bolango.

#### **5) Sekolah Berasrama Sains**

Sekolah berasrama sains merupakan sekolah berasrama yang memfokuskan diri pada pendalaman pengajaran keilmuan, dalam hal ini ilmu-ilmu alam dan ilmu pasti. Sekolah ini memfokuskan diri pada pengajaran akademik. Pendalaman materi akademik ini dilakukan bukan hanya di dalam jam belajar normal, namun juga di luar jam-jam normal dan mengambil jam-jam yang biasanya dialokasikan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan, seperti yang diterapkan SMA Mohammad Husni Thamrin Jakarta, para peserta didik juga didorong untuk

berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat yang disebut sebagai Thamrin Mengajar. Program rutin setiap Kamis sore tersebut mengundang masyarakat sekitar untuk belajar sains dengan bimbingan para peserta didik sekolah MH Thamrin.

Meskipun demikian, model-model sekolah berasrama di atas tidak dikembangkan secara eksklusif. Banyak dari sekolah-sekolah tersebut yang mengombinasikan nilai-nilai yang ada, meskipun terdapat salah satu yang menonjol sebagai identitas utama. SMA Dwi Warna yang berafiliasi keislaman, misalnya, juga menekankan pentingnya pengembangan sains dalam kurikulumnya. Selain itu, SMA Terpadu Wira Bhakti di Sulawesi Selatan yang berorientasi ketarunaan juga merupakan sekolah berbasis keagamaan karena hanya menerima peserta didik-peserta didik dari kalangan Muslim.

#### **b. Kurikulum**

Arah dan pendekatan pengembangan kurikulum yang dirancang untuk sekolah berasrama

hendaknya menuju pada mereka belajar untuk kehidupan; mereka tidak hanya sekadar belajar hanya untuk belajar. Pengembang kurikulum perlu senantiasa mentransformasikan diri untuk mengembangkannya melalui pendekatan dan penerapan model-model pembelajaran yang dapat meningkatkan berbagai aspek antara lain jiwa kewirausahaan, kemandirian, fungsional, produktivitas, kreativitas, inovasi bagi peserta didik sebagai bekal dasar untuk hidup di masyarakat. Dengan begitu, peserta didik yang bersekolah dengan model berasrama dapat didorong sekuat tenaga dan daya agar mereka menjadi bagian dari bangsa yang maju dan berdaya saing tinggi.

Tidak ada bangsa maju dan berdaya saing tinggi tanpa didukung pendidikan yang baik dengan kebijakan desain kurikulumnya tidak dirancang yang visioner serta pembelajaran, baik di sekolah maupun di asrama sesuai tantangan dan kebutuhan masa depan. Hanya dengan pengembangan kurikulum yang sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat masa depan pembangunan

sumber daya manusia yang cakap, cerdas, kreatif, dan kompeten akan mampu disiapkan. Untuk itu, pengembangan dan penyusunan kurikulum sekolah berasrama yang dirancang beserta dokumen pendukungnya ke depan mesti dilakukan secara baik, terarah, dan sungguh-sungguh dengan fokus utama pada daya guna dan hasil guna sehingga pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan mutu peserta didik. Oleh karena itu, pada sisi yang lain, perlu juga mewadahi sistem nilai, seperti nilai keagamaan, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai politis yang perlu dipelihara dan dikuatkan dalam kurikulum tersebut.

Agar pengembangan kurikulum sekolah berasrama yang dirancang memiliki makna yang dalam maka perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari birokrat pembuat kebijakan, praktisi, pengguna lulusan, ahli, hingga pemerhati pendidikan. Ketika kurikulum sekolah berasrama dijadikan sebagai dasar pijakan dan dijadikan sebuah strategi dalam pengembangan pembangunan sumber daya manusia, maka



kurikulum tersebut tampil sebagai wadah program-program yang handal dan terpadu dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Dengan pemikiran seperti itu, maka pelibatan berbagai komponen masyarakat dalam merancang kurikulum diharapkan menghasilkan kebijakan yang futuristik.

Pengembangan kurikulum sekolah berasrama yang dirancang juga harus mampu mengintervensi dan bersesuaian dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan secara bertanggung jawab. Intervensi itu direncanakan melalui kurikulum dengan pendekatan partisipatif, humanistik dan mengubah pembelajaran ke konstruktivis yang dilakukan dengan pendekatan kontekstual dan berpusat pada peserta didik. Hasil dari penelaahan tersebut mengindikasikan bahwa dalam penyusunan kurikulum sekolah berasrama penyusun program seyogyanya memiliki kepekaan dan kemampuan mengidentifikasi dan mencatat kebutuhan masyarakat, variasi keasramaan peserta didik, bakat dan minat mereka sehingga dapat memobilisasi sumber daya yang dapat berguna

untuk dijadikan dasar pengembangan berbagai aktivitas pembangunan masyarakat asrama itu sendiri yang sesuai dengan kebutuhan konteks lokal.

Berdasarkan berbagai pemikiran di atas, sebagai sekolah yang didesain untuk berasrama bagi peserta didiknya, maka untuk saat ini kurikulum yang sesuai akan digunakan adalah Kurikulum 2013. Ada beberapa pertimbangan kerangka pikir, mengapa kurikulum tersebut yang dipakai. Berikut rasionalitas konsepsi Kurikulum 2013.

Perangkat Kurikulum 2013 mencakup beberapa dokumen, yaitu terdiri atas: 1) Standar Kompetensi Lulusan; 2) Kerangka Dasar Kurikulum; 3) Struktur Kurikulum; 4) Silabus; 5) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; 6) Buku Pedoman; dan 7) Buku Teks Pelajaran.

Secara umum, konsepsi kurikulum yang dimaksud selalu terkait dengan perubahan-perubahan strategis yang terjadi di masyarakat, seperti kepemimpinan, sistem politik, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya/seni, sistem ekonomi, moralitas/etika, keberagamaan, pertumbuhan

penduduk, dan globalisasi. Secara teoritik, kurikulum adalah program pendidikan untuk menyiapkan generasi muda bangsa yang akan berkontribusi setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan menjadi anggota masyarakat. Sebagai program pendidikan, kurikulum selalu berakar pada budaya bangsa, berdasarkan kehidupan masa lalu dan masa kini, dan berorientasi kepada prediksi kehidupan masa depan.

Pengembangan kurikulum lazimnya berkaitan dengan ide, perancangan, dokumen, dan pengimplementasiannya. Pancasila sebagai suatu filosofis kehidupan bangsa senantiasa menginspirasi ide dasar pengembangan Kurikulum 2013. Filosofi tersebut menjadi sesuatu nilai yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehingga manusia Indonesia yang dikembangkan melalui kurikulum pendidikan haruslah: 1) Manusia yang beragama dan menghormati agama orang lain; 2) Cinta bangsa, tanah air, dan negara; 3) Memiliki kepedulian untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan, sosial dan ekonomi yang

berkeadilan; 4) Demokratis yang mampu menghargai pluralisme sosial dan budaya; dan 5) Mampu berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang bermartabat dan saling menghargai. Untuk itu, Kurikulum 2013 haruslah mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menempatkan budaya Indonesia sebagai dasar pengembangan pendidikan Indonesia yang mampu dan bermanfaat untuk mengembangkan kualitas manusia Indonesia, bukan manusia yang berbudaya lain.

Dengan menempatkan Pancasila sebagai penggerak ide landasan, maka filosofi itu menjadi tumpuan filosofi programatik pengembangan Kurikulum 2013, yaitu esensialisme, perenialisme, rekonstruksi sosial, dan humanisme. Keempat filosofi ini digunakan secara eklektik sesuai dengan kebutuhan Kurikulum 2013. Landasan *esensialisme* digunakan untuk mengembangkan kemampuan intelektual berdasarkan pandangan disiplin ilmu. Landasan *perenialisme* digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir

rasional melalui pewarisan nilai-nilai budaya dan kecemerlangan bangsa. Landasan *rekonstruksi sosial* digunakan untuk mengaitkan apa yang dipelajari peserta didik di satuan pendidikan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Landasan *humanisme* memberikan kebebasan kepada peserta didik belajar dan posisinya sebagai subjek dalam belajar. Dengan kata lain, keempat filosofi tersebut sekaligus dijadikan pendekatan dalam perancangan kurikulum.

Perancangan kurikulum berkenaan dengan organisasi konten kurikulum. Atas pemikiran itu, maka konten Kurikulum 2013 bukan sekadar daftar mata pelajaran. Mata pelajaran adalah unit terkecil dalam organisasi konten kurikulum yang saling terkait satu sama lain yang secara konseptual menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Dengan prinsip bahwa pengembangan kompetensi keterampilan dan kompetensi sikap sebagai konten kurikulum yang termasuk kelompok konten berkembang (*developmental content*), maka diperlukan

penguatan-penguatan secara vertikal (dalam satu mata pelajaran) dan horizontal (dalam setiap kegiatan pembelajaran antarmata pelajaran). Berbeda dengan kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan konten masteri (*mastery content*) yang dapat dimiliki dalam satu pertemuan, konten kompetensi sikap yang berkembang harus dibina dalam waktu panjang selama proses pendidikan berlangsung di suatu jenjang pendidikan, dan bahkan mesti dilanjutkan di jenjang berikutnya.

Atas dasar kerangka pikir seperti itu, maka dalam perancangan Kurikulum 2013 diperlukan suatu pengikat konten kurikulum (*organizing element*). Kurikulum 2013 menggunakan Kompetensi Inti (KI) sebagai organisasi pengikat. Organisasi pengikat tersebut mencakup empat kompetensi, yaitu: 1) Sikap spiritual; 2) Sikap sosial; 3) Pengetahuan; dan 4) Keterampilan (penerapan pengetahuan). Oleh karena kompetensi ini dijadikan pengikat konten, maka KI merupakan tujuan bagi peserta didik selama satu tahun. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya tahu

tetapi mampu menggunakan pengetahuan dalam kehidupan sehingga prinsip *I see, I know, I do, and I understand* dapat dibudayakan. Konteks dan kompetensi inti menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum yang diturunkan ke dalam kompetensi masing-masing mata pelajaran. Artinya, keempat KI pada semua mata pelajaran memiliki turunan kompetensi yang disebut Kompetensi Dasar (KD).

Setiap mata pelajaran memberikan kontribusi kompetensi dan juga KI sesuai dengan karakteristiknya melalui semua jalur pembelajaran. Karenanya, dapat dikatakan bahwa pencapaian kompetensi merupakan hasil kolaborasi setiap mata pelajaran. Karena itu, dalam setiap mata pelajaran harus dikembangkan KD yang mengacu kepada keempat kompetensi inti tersebut. Dengan pendekatan perancangan seperti itu, maka peserta didik akan berkembang kemampuannya sekaligus menghasilkan berbagai bentuk aplikasi sehingga kemampuan berpikir teknologis juga akan berkembang di samping kemampuan berpikir tingkat tinggi, kreatif dan

inovatif setelah mereka tamat pada jenjang satuan pendidikan tertentu, yang dipandu dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Di mana SKL memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai melalui kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi selama satuan waktu tertentu.

Jiwa dari pengimplementasian Kurikulum 2013 adalah pembelajaran, yakni diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, inspiratif, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Kemdikbud, 2014b). Pembelajaran seperti itu, intinya memberikan pengalaman bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia yang memberi apa yang dimilikinya untuk membangun kehidupan yang lebih berkualitas. Pembelajaran pada Kurikulum 2013 adalah



diarahkan guna mengembangkan potensi peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mampu, dan dari tidak mau menjadi mau. Proses tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia.

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Melalui penerapan pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (saintifik), pembelajaran harus mengembangkan beragam kemampuan seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/eksperimen, mengolah informasi/asosiasi, dan mengomunikasikan. Kelima kemampuan ini dapat dikembangkan sehingga setiap peserta didik harus menguasainya. Strategi untuk menguasai setiap kemampuan itu

sepenuhnya ditentukan oleh guru di suatu lembaga pendidikan tetapi kemampuan-kemampuan tersebut menjadi milik peserta didik dan mereka gunakan untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi lainnya.

Sementara itu, dalam konteks kurikulum berdasarkan kompetensi (*competency-based curriculum*), dan pendekatan belajar tuntas (*mastery learning*) penilaian proses dan hasil belajar merupakan parameter tingkat pencapaian kompetensi minimal. Untuk itu, Kurikulum 2013 mempersyaratkan penggunaan penilaian autentik (*authentic assessment*). Secara paradigmatis penilaian autentik memerlukan perwujudan pembelajaran autentik (*authentic instruction*) dan belajar autentik (*authentic learning*). Hal ini diyakini bahwa penilaian autentik lebih mampu memberikan informasi kemampuan peserta didik secara holistik dan valid. Dengan demikian, penilaian hasil belajar oleh guru adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi

pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran.

Di samping konseptual yang diungkapkan di atas, terdapat beberapa prinsip yang dianut dalam mengembangkan Kurikulum 2013, yakni: 1) Sebagai jawaban pendidikan terhadap kebutuhan bangsa; 2) Secara kategorial pengertian kurikulum sebagai program pendidikan diberi arti dalam dimensi ide, dokumen tertulis, proses pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik; dan 3) Menganut pendekatan kurikulum berbasis kompetensi.

Secara konseptual, kurikulum adalah jawaban pendidikan terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Definisi ini sering dilupakan orang padahal kurikulum dalam pengertian ini teramat penting karena definisi ini menggambarkan posisi pedagogis kurikulum dalam mengembangkan potensi peserta didik, dan landasan bagi pertanyaan utama yang harus dijawab ketika proses pengembangan suatu kurikulum akan dimulai. Oleh karena itu, pengertian ini sangat

fundamental dan menggambarkan posisi sesungguhnya kurikulum dalam suatu proses pendidikan. Atas dasar pemikiran tersebut, Klein (1999) menempatkan posisi kurikulum sebagai *"the heart of education"*. Dengan posisi tersebut maka proses pengembangan kurikulum tidak boleh hanya terjebak pada pengertian kurikulum yang berkaitan dengan dimensi kurikulum semata dan bersifat praktis tetapi dimulai dengan jawaban yang diberikan pendidikan terhadap tantangan masyarakat bagi kehidupan manusia Indonesia di masa kini dan masa mendatang. Setelah jawaban tersebut diperoleh maka proses pengembangan kurikulum sebagai rencana tertulis baru dapat dimulai, dilanjutkan dengan pengembangan kurikulum sebagai proses pembelajaran, dan evaluasi hasil kurikulum.

Berkaitan dengan penerapan kurikulum, sebagian besar sekolah berasrama melakukan modifikasi dan pengembangan kurikulum secara mandiri. Kurikulum yang dikembangkan meliputi Kurikulum Nasional (K13) dan Kurikulum Cambridge atau sejenis. Penyusunan kurikulum

oleh tim yang terdiri dari guru mata pelajaran dan konsultan. Capaian hasil belajar terdiri dari komponen ujian hasil belajar dan perilaku di asrama (kedisiplinan, sikap, kemandirian, dan sebagainya). Selain pembelajaran akademik, sekolah memberikan pembelajaran non-akademik/ekstrakurikuler yang terdiri dari beberapa jenis seperti kerohanian, kewirausahaan, olahraga, kesenian, dan sebagainya. Kurikulum non-akademik/ekstrakurikuler disusun sendiri oleh tim khusus sekolah dan pembina asrama. Model pengasuhan di asrama dilakukan oleh pembina asrama dengan cara mengawasi kegiatan peserta didik di luar jam pembelajaran, pemberian konseling dan penegakan peraturan asrama. Selain itu, ada pertemuan rutin setiap minggunya yang dilakukan oleh pembina asrama kepada peserta didik dalam upaya pembinaan peserta didik. Peraturan kehidupan di asrama yang disusun oleh kepala sekolah bersama tim manajemen disosialisasikan melalui pembagian buku pribadi peserta didik, papan pengumuman dan saat pertemuan rutin. Sanksi peringatan atas terjadinya pelanggaran berupa teguran lisan dan hukuman

fisik (misalnya lari keliling lapangan, berdiri di lapangan, *push up*, dan sebagainya yang bertujuan untuk melatih fisik peserta didik dan bukan mengandung unsur kekerasan) dan sanksi terberat adalah dikeluarkan dari sekolah.

### **c. Sumber Daya Manusia**

#### **1) Kepala Sekolah**

Setiap sekolah berasrama dapat menentukan kriteria yang berbeda-beda dalam pemilihan kepala sekolah. Adapun dalam kasus sekolah berasrama yang dikaji dalam naskah akademik ini, kualifikasi akademik minimal untuk kepala sekolah adalah S2 atau magister. Di samping itu, pemilihan juga didasarkan pada pengalaman memimpin sekolah-sekolah lain sebelumnya. Dalam hal pemilihan kepala sekolah negeri, usulan berasal dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) sementara untuk sekolah swasta pemilihan dilakukan oleh pihak yayasan pengelola sekolah.

Untuk menjaga kualitas sekolah berasrama, diperlukan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah negeri dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sementara kepala sekolah swasta dievaluasi oleh yayasan yang menaungi sekolah dimaksud. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan capaian mutu dan prestasi sekolah.

Dalam rangka meningkatkan kinerjanya, kepala sekolah perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Dalam kasus yang dikaji, program-program pengembangan sumber daya manusia bagi kepala sekolah di antaranya adalah pelatihan manajerial, pengembangan kurikulum, dan kewirausahaan.

## **2) Guru Sekolah**

Dalam rangka menjaga kualitas sekolah, sekolah berasrama menentukan kualifikasi tertentu untuk rekrutmen gurunya. Dalam kasus yang dikaji, kualifikasi akademik guru mata pelajaran adalah minimal S1 dengan

jurusan yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Rekrutmen guru untuk sekolah negeri dilakukan dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau melalui mekanisme penempatan guru yang merupakan wewenang pemerintah daerah setempat. Sementara untuk sekolah swasta, mekanisme pengangkatan dapat melalui seleksi terbuka dan atau penunjukan langsung yayasan pengelola sekolah. Kinerja guru dievaluasi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan mempertimbangkan aspek kehadiran, pelaksanaan tugas dan program pengajaran, sikap dan perilaku keteladanan, serta capaian prestasi peserta didik.

Mengingat sekolah berasrama adalah sekolah dengan durasi proses pendidikan yang lama, dapat dikatakan 24 jam, maka diperlukan guru yang lebih banyak. Kasus yang dikaji menunjukkan bahwa kisaran rasio guru-peserta didik adalah 1:5.



### **3) Pembina Asrama**

Salah satu tenaga kependidikan yang khas sekolah berasrama adalah personel yang bertugas mengawasi dan membina peserta didik selama berada di asrama. Istilah-istilah yang biasa digunakan untuk menyebut para personel itu misalnya adalah pembina asrama dan wali asrama. Biasanya, di antara para pembina asrama ada kepala asrama. Dalam hal kualifikasi akademik, kepala asrama disyaratkan untuk memiliki pendidikan minimal S1, sementara pembina asrama boleh berpendidikan lebih rendah dari S1.

Mekanisme pengangkatan pembina asrama adalah melalui seleksi terbuka atau diangkat langsung oleh kepala sekolah dan manajemen sekolah. Pertimbangan yang diambil dalam pengangkatan pembina asrama yaitu pengalaman dan kepribadian. Kinerja pembina asrama dievaluasi oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang asrama/kepala asrama dengan mempertimbangkan aspek kedisiplinan, ketaatan, kemampuan

manajerial/mengatasi masalah, dan sebagainya. Berdasarkan kasus yang dikaji, kisaran rasio pembina asrama-peserta didik adalah 1:10.

#### **4) Peserta Didik**

Peserta didik sekolah berasrama diseleksi dengan mekanisme yang beraneka ragam, di antaranya yaitu seleksi nilai rapor, penelusuran minat dan bakat, dan ujian masuk mandiri. Sekolah memiliki kuota untuk calon peserta didik dengan kriteria tertentu, di antaranya peserta didik miskin, peserta didik berprestasi, dan peserta didik dalam satu wilayah dan peserta didik luar kota.

#### **d. Sarana Prasarana Pendidikan**

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting

dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Tujuan pendidikan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh peralatan yang cukup memadai, sehingga tujuan itu dapat dicapai dengan baik.

Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengatur masalah standar sarana dan prasarana dijelaskan pada Pasal 42 Ayat (1): “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber-sumber lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ayat (2): “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang

pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang perlu dan sangat penting untuk dikelola dengan baik serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan. Seperti gedung, tanah, perlengkapan administrasi sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar di kelas. Sarana dan prasarana pendidikan juga sebagai salah satu dari unsur manajemen pendidikan yang memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana pendidikan juga digunakan untuk mempermudah pemahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam

program kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan, kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih bermakna dan berkualitas serta menyenangkan.

Pemenuhan sarana prasarana membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang matang, terutama jika sekolah tersebut melaksanakan sistem asrama. Keberadaan sekolah dengan asrama wajib didukung sarana prasarana yang lengkap agar proses kegiatan berjalan maksimal. Kondisi sebagian besar sekolah berasrama di Indonesia melakukan pengadaan sarana prasarana melalui sumber pengadaan utama dari pemerintah (negeri) dan yayasan (swasta). Selain dari kedua sumber di atas, ada pula sekolah berasrama yang menggunakan sumber dana masyarakat dan atau hasil usaha/mandiri sekolah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana sekolah. Dalam setiap sekolah berasrama setidaknya dibutuhkan luas lahan minimal sekitar 3 hektar. Adapun beberapa komponen utama pada masing-masing sekolah berasrama meliputi ruang kelas

( $\pm 63 \text{ m}^2$ ), ruang guru ( $\pm 112 \text{ m}^2$ ), kamar peserta didik ( $\pm 36 \text{ m}^2$ ), perpustakaan ( $\pm 200 \text{ m}^2$ ), laboratorium IPA ( $\pm 80 \text{ m}^2$ ), laboratorium IPS ( $\pm 80 \text{ m}^2$ ), laboratorium bahasa ( $\pm 80 \text{ m}^2$ ), laboratorium komputer ( $\pm 80 \text{ m}^2$ ), ruang makan ( $\pm 200 \text{ m}^2$ ), dapur ( $\pm 150 \text{ m}^2$ ), kantin ( $\pm 150 \text{ m}^2$ ), rumah ibadah ( $\pm 225 \text{ m}^2$ ), aula/ruang pertemuan ( $\pm 250 \text{ m}^2$ ), koperasi ( $\pm 60 \text{ m}^2$ ), dan sebagainya. Selanjutnya sarana dan prasarana tersebut dilakukan mekanisme perawatan berkala oleh petugas kebersihan sekolah dengan diawasi oleh kepala sekolah dan tim manajemen sekolah.

**e. Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi Sumber Daya Manusia (SDM), penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang tepat guna. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu

pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program.

Pemerintah dalam hal ini memegang peranan yang esensial demi terciptanya situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2003) bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Kata kunci tidak diskriminatif di sini berlaku untuk pembiayaan pendidikan, artinya bahwa pembiayaan pendidikan haruslah tidak mendiskriminatifkan setiap warga negara yang memiliki keinginan untuk dapat mengikuti

pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dirinya.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai amanat UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat (1). Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu: 1) Peningkatan potensi SDM yang berkualitas; 2) Penyediaan komponen-komponen sumber-sumber pembiayaan pendidikan; 3) Penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana; 4) Pengefektifan dan pengefisienan penggunaan dana; 5) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan; 6) Meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan.



Penerimaan dana untuk membiayai sekolah baik di sekolah regular maupun sekolah berasrama diperoleh dari BOS Pusat dan BOSDA (negeri), dan orang tua peserta didik, yayasan dan pemerintah pusat/daerah berupa BOS/BOSDA (swasta). Adapun beberapa komponen pengeluaran dana untuk sekolah berasrama meliputi Kegiatan Belajar Mengajar ( $\pm 6\%$ ), Konsumsi ( $\pm 44\%$ ), Gaji dan Tunjangan Non PNS ( $\pm 26\%$ ), Pengadaan Sarpras ( $\pm 12\%$ ), dan Perawatan Sarpras ( $\pm 12\%$ ). Berdasarkan hasil analisis data sekunder di beberapa sekolah berasrama, ditemukan rata-rata besaran *unit cost* per peserta didik sebesar  $\pm \text{Rp}4.500.000,00/\text{peserta didik/bulan}$  (negeri) dan sebesar  $\pm \text{Rp}12.500.000,00/\text{peserta didik/bulan}$  (swasta).

#### **f. Kerja Sama**

Dalam rangka meningkatkan kualitasnya, sekolah berasrama menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Kasus yang dikaji menunjukkan bahwa kerja sama tersebut meliputi penerapan kurikulum pembelajaran, pengembangan kegiatan non-

akademik/ekstrakurikuler, pengembangan SDM,  
dan pengembangan fasilitas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data sekunder dan survey. Data sekunder bersumber dari data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan data input dan output sistem pendidikan, seperti data guru, sarana prasarana, pembiayaan pendidikan, hasil prestasi akademik siswa. Sedangkan data primer diperoleh dari survei sekolah khususnya terkait dengan pengelolaan sekolah berasrama. Di samping itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara kepada sejumlah narasumber (informan) di provinsi dan kabupaten/kota.

#### **B. Fokus, Lokasi, dan Sampel Penelitian**

Fokus penelitian penelitian yaitu capaian pengelolaan sekolah berasrama yang dilihat dari 8 (delapan) komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk memperoleh informasi hal tersebut, sejumlah narasumber pengambil keputusan di bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota digunakan sebagai

informan, seperti Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan, dan/atau pejabat yang mewakilinya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Informasi yang didiskusikan di antaranya mencakup kebijakan pengelolaan sekolah berasrama dalam mengatasi masalah akses, mutu dan karakter. Adapun sekolah berasrama yang dijadikan sampel adalah dengan karakteristik khusus seperti ketarunaan, kejuruan, keolahragaan, sekolah unggulan provinsi, dan sebagainya. Adapun tujuannya untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan sekolah berasrama pada masing-masing karakteristik tersebut.

Lokasi penelitian dilaksanakan di 4 (empat) provinsi dan setiap provinsi dengan kriteria memiliki sekolah berasrama dengan karakteristik khusus. Provinsi yang terpilih yaitu Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya untuk survei sekolah ditarik sampel sebanyak 4 sekolah berasrama negeri/swasta dengan masing-masing karakteristik tertentu yang berlokasi pada masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Adapun rincian sampelnya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Sekolah Sampel

No.	Karakteristik Sekolah Berasrama	Nama Sekolah	Provinsi
1.	Sekolah Unggulan Provinsi (gratis)	SMA Negeri Sumsel	<b>Sumatera Selatan</b>
2.	Sekolah Olahraga	SMP Olahraga Negeri Sriwijaya	
3.	Sekolah Akses	SMK Negeri 1 Gelumbang	
4.	Sekolah Unggulan	SMA Negeri 17 Palembang	
5.	Sekolah Unggulan	SMA Negeri Cahaya Madani	<b>Banten</b>
6.	Sekolah Unggulan	SMK Negeri 2	
7.	Sekolah Keagamaan	SMA Nurul Fikri	
8.	Sekolah Akses	SMK Negeri 4	
9.	Sekolah Akses	SMAN 2 Sekayam	<b>Kalimantan Barat</b>
10.	Sekolah Perikanan	SUPM Negeri Pontianak, Kubu Raya	
11.	Sekolah Pertanian	SPP SPMA Singkawang	
12.	Sekolah Akses	SMK Panca Bhakti, Memapawah	
13.	Sekolah Ketarunaan	SMA Taruna Nusantara	<b>Jawa Tengah</b>
14.	Sekolah Unggulan Provinsi (gratis)	SMK Negeri Jawa Tengah	
15.	Sekolah Akses	SMK Negeri 1 Bawen	
16.	Sekolah Unggulan	SMA Semesta	

### **C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

Pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dokumentasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah berasrama. Instrumen penelitian yang digunakan berupa panduan dokumen.
2. Pengumpulan data statistik sekolah berasrama dan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang sekolah berasrama yang relevan dengan kajian yang akan dilakukan. Data yang dikumpulkan antara lain data skema pengelolaan dan capaian sekolah berasrama dilihat dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
3. Pengumpulan data survei sekolah. Data yang dikumpulkan antara lain jumlah dan kondisi sarana dan prasarana, guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan, dan sebagainya.
4. Wawancara kepada narasumber/informan di tingkat provinsi baik informan dari pengambil kebijakan (Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan, pejabat terkait) maupun informan yang berasal dari satuan pendidikan. Informasi yang dibutuhkan antara lain

adalah skema pengelolaan dan capaian sekolah berasrama. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dan/atau panduan diskusi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sekolah berasrama adalah model pendidikan yang dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan akses, mutu dan karakter peserta didik. Sekolah berasrama menuntut peserta didik untuk tinggal di asrama dan berinteraksi secara lebih lama dengan para pengajar dan peserta didik lain. Dalam proses pendidikan seperti itu, peserta didik tidak hanya mendapatkan kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan emosional dan spiritual. Berikut ini disampaikan kondisi capaian pengelolaan sekolah berasrama di beberapa provinsi sampel.

#### **A. Provinsi Sumatera Selatan**

##### **1. Kebijakan Daerah**

Berdasarkan informasi dari Bappeda Provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah mengalokasikan pada tahun 2017 sebesar 11.189.719.400 di 9 SMA, terkait dengan operasional makan dan minum. Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Sampoerna Foundation, Surya dan lain-lain untuk ikut membantu membangun pendidikan di



Sumatera Selatan. Untuk kebijakan sekolah berasrama sudah mulai mapping, telah dianggarkan 100 milyar untuk bantuan sekolah berasrama.

## **2. Nilai-Nilai Sekolah**

Empat sekolah peserta DKT mewakili tiga kategori: sekolah akses (SMK Negeri 1 Gelumbang dan SMA Negeri Sumsel) dan sekolah unggulan (SMA Plus Negeri 17 Palembang), dan sekolah karakter khusus (SMP Olahraga Negeri Sriwijaya). Keempat sekolah tersebut mengunggulkan nilai-nilai keilmuan, keolahragaan, dan kepemimpinan sebagai *platform* sekolah. Khusus untuk SMP Olahraga Negeri Sriwijaya dibentuk untuk mendidik atlet berprestasi pada usia sekolah yang dipersiapkan untuk mengikuti perlombaan olahraga level nasional dan internasional.

## **3. Kurikulum dan Sistem Pengasuhan**

Untuk kurikulum, SMK Negeri 1 Gelumbang menggunakan Kurikulum 2013 dengan cara melakukan pengembangan kurikulum secara mandiri oleh tim khusus sekolah. Dalam mengevaluasi peserta didik, sekolah tersebut mempertimbangkan aspek ujian hasil belajar sebanyak 80 persen dan penilaian

perilaku di asrama sebesar 20 persen. Selanjutnya untuk SMA Plus Negeri 17 Palembang yang dikategorikan sebagai sekolah unggulan telah menggunakan Kurikulum 2013 sebagai landasan proses KBM yang mana penyusunannya menggunakan cara adopsi dari pemerintah pusat. Dalam evaluasi peserta didik, sekolah tersebut mempertimbangkan aspek ujian hasil belajar, penilaian perilaku di asrama dan budaya gemar membaca dan menulis. Kemudian untuk SMA Negeri Sumatera Selatan yang dikhususkan untuk peserta didik yang pintar dan miskin telah menggunakan kurikulum kombinasi dari Kurikulum 2013, Kurikulum 2006 dan Kurikulum Cambridge yang disusun oleh tim sekolah sebagai dasar kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang terakhir adalah sekolah karakter khusus yang dalam hal ini adalah sekolah keolahragaan. Untuk SMP Olahraga Negeri Sriwijaya masih menggunakan KTSP 2006 sebagai landasan proses KBM di sekolah karena sulitnya memenuhi jumlah minimal siswa dan aturan lainnya jika menggunakan Kurikulum 2013. Dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik, sekolah ini mempertimbangkan aspek ujian hasil belajar sebanyak

60 persen, penilaian perilaku di asrama sebesar 40 persen, dan peningkatan prestasi olahraga. Hal yang menarik adalah apabila peserta didik yang berada di sekolah tersebut tidak mampu meningkatkan prestasi olahraganya, maka akan dikeluarkan dari sekolah.

Dalam proses pembelajaran, SMK Negeri 1 Gelumbang dan SMK Plus Negeri 17 Palembang yang tidak mengasramakan seluruh siswanya dikarenakan minimnya daya tampung asrama. Untuk SMK Negeri 1 Gelumbang, asrama yang tersedia di sekolah dikhususkan untuk siswa miskin dan siswa dengan jarak rumah yang jauh (minimal 10 km), sedangkan untuk SMK Plus Negeri 17 Palembang, asramanya dikhususkan untuk kelas X. Sistem pengasuhan di kedua sekolah tersebut mengembangkan kurikulum secara mandiri yang dirumuskan oleh wakasek kesiswaan dan timnya. Sekolah ini memiliki beberapa strategi dalam penanaman nilai-nilai karakter siswa dalam kesehariannya, seperti membiasakan hidup mandiri, menanamkan percaya diri yang tinggi, ceramah agama, mentoring, dan menanamkan rasa saling menghargai sesama penghuni asrama. Selanjutnya untuk SMA Negeri Sumatera Selatan,

dalam upaya pembinaan terhadap siswa sekolah tersebut telah mengagendakan kegiatan rutin bagi siswa di asrama seperti pertemuan rutin antara peserta didik dengan pembina asrama selama 1 kali seminggu, pengajian rutin selama 2 kali seminggu, kegiatan apel pagi dan malam setiap hari, dan kegiatan olahraga bersama. Sekolah ini telah memiliki berbagai strategi dalam penanaman nilai-nilai karakter bagi siswa di asrama dan sekolah yang meliputi: pembinaan rutin dalam upacara/apel, pembuatan poster/*banner* dan papan komitmen, kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan, dan pelatihan/*workshop* rutin. Selanjutnya untuk SMP Olahraga Negeri Sriwijaya, kurikulum non-akademik disusun oleh pelatih cabang olahraga masing-masing dengan melibatkan KONI, Dispora Provinsi, dan pelatih cabang olahraga.

#### **4. Manajemen Sekolah**

##### **a. Sumber Daya Manusia (Kepala Sekolah, Guru, Pembina Asrama, dan Peserta Didik)**

Seluruh kepala sekolah dan guru di keempat sekolah ini memiliki gelar minimal S1. Pertimbangan utama pemilihan kepala sekolah di

Provinsi Sumsel adalah melalui diklat calon kepala sekolah dan diangkat oleh Gubernur. Berbagai macam cara dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas kepala sekolah antara lain pelatihan manajerial, pelatihan pengembangan kurikulum, pelatihan ICT, dan khusus di SMP Olahraga Negeri Sriwijaya ada pelatihan tenaga pelatih internasional. Kinerja kepala sekolah dievaluasi melalui indikator mutu sekolah, jumlah prestasi peserta didik, dan banyaknya siswa yang mendaftar. Untuk guru sekolah berasrama di Provinsi Sumatera Selatan memiliki kualifikasi pendidikan minimal adalah S1 dengan pertimbangan penerimaan berdasarkan hasil tes akademik, pengalaman dan wawancara. Mekanisme pengangkatan guru dilakukan melalui seleksi terbuka dan ada pula yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Selanjutnya terkait dengan pembina asrama, memiliki kualifikasi pendidikan minimal adalah S1 yang dinilai berdasarkan pengalaman, latar belakang pendidikan dan sikap. Mekanisme pengangkatan pembina asrama di sekolah berasrama di Provinsi Sumsel dilakukan melalui seleksi terbuka dan ada

pula yang melalui penunjukkan langsung oleh kepala sekolah.

Untuk peserta didik, sekolah-sekolah akses menerapkan seleksi yang sangat longgar. Hal ini karena mereka bertujuan melayani siapapun yang berkeinginan untuk bersekolah. Bahkan hampir seluruh pendaftar diterima di sekolah. Sekolah hanya menyeleksi siswa-siswa yang dapat tinggal di asrama. Hal ini karena keterbatasan sarana asrama. Dalam hal ini sekolah memprioritaskan mereka yang tinggalnya jauh dari sekolah untuk diasramakan. Sementara itu, sekolah-sekolah unggulan menerapkan seleksi yang cukup ketat kepada para siswa yang diterima. Selain pendaftaran yang dilakukan secara *online* dan nilai raport, sekolah juga melakukan tes tertulis kepada calon siswa.

#### **b. Sarana dan Prasarana Sekolah**

Berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah berasrama di Provinsi Sumsel, pengadaannya dilakukan melalui pemerintah pusat, provinsi, sumbangan orang tua, bantuan CSR dan kementerian/lembaga lainnya. Rata-rata luas lahan

yang dibutuhkan sekolah berasrama di Provinsi Sumsel seluas 2.800 m<sup>2</sup> hingga 35.000 m<sup>2</sup>. Terkait kelengkapan sarana dan prasarana di SMKN 1 Gelombang, dalam lokasi seluas 33 hektar telah memiliki kelengkapan laboratorium, misalnya laboratorium Bahasa Inggris, laboratorium komputer, setiap mata pelajaran ada laboratorium yang lengkap, dan sudah ada bengkel sendiri. Untuk SMP Olahraga Sriwijaya kelengkapan dan kondisi sarpras, dibedakan menjadi beberapa komponen, yang pertama sarpras yang bersifat akademik yaitu ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, ruang makan, klinik, ruang rapat, dan sebagainya, kelengkapannya sudah bagus dan cukup, termasuk ada aula untuk bela diri, voli, dan basket. Tetapi tahun ini belum ada rehab untuk voli dan basket, karena dibangun oleh dinas pendidikan tahun 2006, sehingga beberapa yang lantainya dari kayu harus diperbaiki. Berkenaan dengan sarpras pendukung buku dan lain-lain sudah dilengkapi Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, tetapi sebagian besar cabang olahraga di sekolah dengan memanfaatkan PON 2004 atau Sea Games untuk latihan karena memang bebas

keluar masuk di sana. Selanjutnya untuk SMAN Sumatera Selatan kondisi dan kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah sudah sangat memadai, bahkan sebetulnya bisa menambah lebih dari 702 siswa, mungkin 400 atau 500 masih bisa menampung, tetapi anggaran dari pemerintah provinsi masih belum bisa. Kemudian untuk luas lahan yang dimiliki sekitar 3,8 hektar sudah punya kantin yang bisa menampung sekitar 200 siswa, jadi siswa nanti makan pagi siang malam di kantin. Kemudian sekolah juga memiliki teater, pertunjukan seni siswa, *club*, atau kalau ada pertunjukan terkait kerja sama dengan pihak luar atau mengundang pihak luar. Sekolah juga punya dua lapangan basket dan satu lapangan voli. Untuk laboratorium ada laboratorium komputer, untuk laboratorium sains ukuran SMA sudah melebihi standar, tetapi untuk *event* di luar negeri yang mengharuskan uji sampel yang melebihi standar laboratorium SMA, sekolah harus meminta bantuan ke Politeknik Negeri Sriwijaya maupun ke Universitas Sriwijaya untuk melakukan uji laboratorium. Kemudian kondisi dan kelengkapan sarana dan prasarana SMA Negeri 17 Palembang



dapat dikatakan sudah cukup baik. Hanya saja belum memiliki laboratorium bahasa. Kemudian untuk kelengkapan lain sudah cukup baik. Namun, untuk asrama karena sudah lama sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan ataupun kelengkapan alat-alat terutama untuk alat memasak. Untuk laboratorium komputer, baru memiliki laboratorium komputer dua tahun terakhir ini, sehingga sudah bisa praktik komputer itu pun dari bantuan orang tua.

**c. Pembiayaan Pendidikan**

Anggaran yang dimiliki SMA Negeri 17 Palembang sebesar 16 milyar per tahun di atas kertas. Sumbangan sukarela dari asrama sebesar 1.450.000 per anak. Sarana bebas ada yang 10 juta, 20 juta, 5 juta, ada juga yang gratis. Anggaran sebesar 1.450.000 apabila dijabarkan di antaranya untuk alokasi kegiatan belajar pagi dan sore sebesar 500.000, untuk *snack* dan makan di asrama susu dan roti dan lain-lain sebesar 690.000, iuran 20.000, sarana dan prasarana asrama dan *laundry* 100.000, untuk kelas 11 dan 12 sumbangan sukarelanya 800.000 per bulan,

untuk makan 280.000. Selanjutnya untuk seluruh pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Sumsel ada dari BOS, CSR untuk dua siswa, tetapi yang terbesar tentu dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kalau dipresentasikan sekitar 95% dari Pemprov, 3% dari BOS pusat, dan 2% dari CSR. Kecuali dari orang tua, jadi siswa datang hanya dengan membawa badan, seragam, dan bahkan di setiap semester, sekolah memberikan bantuan dana transportasi untuk siswa pulang ke daerah masing-masing. Terkait pembiayaan SMK Negeri 1 Gelumbang berasal dari BOS pusat, dari orang tua baru akhir bulan ini karena sejak dulu sekolah SMK ini gratis di mana SMK itu selalu gratis. Terkait kontribusi pembiayaan SMP Olahraga Negeri Sriwijaya berasal dari Kemdikbud dan Dinas Pendidikan, baik itu mengenai tenaga pendidik, kegiatan KBM, makan, honor pelatih, pakaian seragam dan latihan siswa, serta buku-buku. Kemudian ada juga kontribusi dari Dispora, seperti pengiriman para siswa untuk kompetisi ke luar daerah. Pembiayaan melalui Kemenpora yang langsung ke Dispora, ada beberapa yang diberikan uang saku “anak-anak yang minimal

kualifikasinya juara 3 nasional”. Ada juga kontribusi Koni Provinsi Sumsel, ada *reward* dan pembinaan untuk peraih medali dari PON. Anak-anak juga dapat pesangon dari yang mengirimkan misalnya dari daerah tertentu sesuai dengan daerah asal siswa itu misalnya sebesar satu juta.

#### **d. Kerja Sama dengan Pihak Luar**

Seluruh sekolah berasrama di Provinsi Sumsel telah melakukan kerja sama dalam berbagai hal dengan pihak luar. SMKN 1 Gelombang telah kerja sama dengan universitas di Korea Selatan di bidang pelatihan guru dan pelatihan siswa. Kemudian di bidang pertanian PT Gautama, peternakan sapi di Sumbawa, dan lain-lain. Untuk SMP Olahraga Sriwijaya telah bekerja sama dalam bentuk MoU ke perguruan tinggi ada ke UNSRI, Politeknik UNSRI, UNJ, dan UNNES. Kemudian SMAN Sumatera Selatan melakukan kerja sama dengan Cambridge University di Cambridge Inggris. Bentuk kerja samanya adalah menerapkan Kurikulum Cambridge di sekolah dan mengikutsertakan peserta didik dalam ujian Cambridge. Kemudian *partnership* salah satunya

dengan sekolah di Melbourne Australia, yang merupakan sekolah yang berasrama yang mirip dengan sekolah asrama di Sumsel. Terkait Sampoerna, hanya dalam bentuk asistensi pengelolaan atau manajemennya, jadi Sampoerna memberikan seperti saran dan masukan dan memonitoring serta memberikan adanya evaluasi dan audit terkait peningkatan kualitas manajemen. Terakhir tentang SMA Negeri 17 Palembang, sejak 2010 telah bekerja sama dengan luar negeri, saat ini ada 5 anak yang sudah ke luar negeri yaitu ke Amerika, Jepang dalam rangka Pekan Binaan Pelajar dan Budaya, salah satunya melalui *Student Exchange*. Telah ada mahasiswa dari luar negeri yaitu satu dari Italia dan satu dari Spanyol. Sekolah telah ada kerja sama dengan Singapura dan Malaysia.

## **B. Provinsi Banten**

### **1. Nilai-Nilai Sekolah**

Setiap sekolah berasrama memiliki visi dan misi yang berbeda, visi dan misi ini akan tercermin dari nilai-nilai yang diajarkan dalam pembelajarannya, baik di

kelas maupun di asrama. Dari empat *sample* sekolah di Banten, yaitu SMAN Cahaya Madani, SMA Nurul Fikri, SMKN 2 Pandeglang, dan SMKN 4 Tangerang, cenderung mengedepankan nilai keagamaan di samping nilai keilmuan. Hal ini tentu menjadi ciri khas tersendiri karena di Serang dan sekitarnya merupakan kota “santri” dimana banyak pesantren berkembang di tengah-tengah masyarakat.

SMAN Cahaya Madani, sekolah ini sekolah berasrama yang merupakan sekolah favorit di Provinsi Banten. Sekolah yang mengedepankan nilai keagamaan (Islam), di samping nilai pengetahuan ini, mengembangkan ilmu Bahasa Inggris dan Bahasa Arab sebagai identitas yang berbeda dengan sekolah yang lain. Nilai pengetahuan dan keagamaan diterapkan karena sekolah ini ingin menyeimbangkan antara IPTEK dengan IMTAQ (iman dan taqwa), di samping visi dan misi sekolah.

Hampir sama dengan SMAN Cahaya Madani, sekolah ini memilih nilai keilmuan, keagamaan, dan akhlak yang baik sebagai pengejawantahan dari visi sekolah di mana dalam pembinaan kader pemimpin harus memiliki akhlak dan pemahaman agama yang luas.

Untuk keilmuan, siswa dilibatkan dalam kompetensi yang sehat antarsiswa, sedangkan pemahaman agama dilakukan dalam bentuk mentoring dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. SMKN 2 Pandeglang juga mengedepankan nilai keilmuan dan keagamaan. Alasan seolah memilih nilai agama sebagai pembentukan karakter siswa dan keilmuan sebagai penguatan kompetensi bagi siswa. Strategi yang dilakukan sekolah ini adalah melalui pembiasaan-pembiasaan dalam bentuk aktivitas ibadah.

## **2. Kurikulum dan Sistem Pengasuhan**

Seluruh sekolah sampel telah menggunakan Kurikulum 2013 sebagai kurikulum pembelajaran akademik. SMAN Cahaya Madani mengembangkan kurikulum melalui pengembangan kurikulum mandiri. Dalam praktik pelaksanaannya, SMAN Cahaya Madani mengadopsi Kurikulum STKIP Yohannes Surya ke dalam kurikulum pembelajaran akademik hingga saat ini. Sedangkan untuk non-akademik, mengadopsi Kurikulum Pondok Pesantren Gontor dalam bentuk kurikulum, asrama, bahasa, dan kedisiplinan. SMA Nurul Fikri juga mengembangkan kurikulum pembelajaran melalui pengembangan

kurikulum mandiri. Selain menggunakan Kurikulum 2013, SMA Nurul Fikri juga mengembangkan kurikulum muatan pesantren. Kurikulum pembelajaran SMKN 2 Pandeglang dikembangkan melalui adopsi dan dibentuk tim pengembang kurikulum yang melibatkan dinas pendidikan, pengawas, dunia industri, dan pihak sekolah. SMKN 2 Pandeglang yang juga menggunakan Kurikulum 2013, juga melakukan sinkronisasi kurikulum tersebut dengan dunia industri. Pihak yang bertanggung jawab menyusun kurikulum adalah tim khusus sekolah, di SMA Nurul Fikri juga melibatkan dinas pendidikan kabupaten/kota, sedangkan SMKN 2 Pandeglang melibatkan guru mata pelajaran terkait.

Seluruh sekolah memberikan bekal non-akademik dalam bentuk kerohanian, kewirausahaan, olahraga, dan kesenian, khusus SMKN 2 Pandeglang ditambah dengan keterampilan yang disesuaikan dengan jurusan masing-masing, seperti pertanian dengan budidaya tanaman. Kurikulum non-akademik di SMA Nurul Fikri dan SMKN 2 Pandeglang dikembangkan melalui pengembangan kurikulum mandiri, sedangkan SMAN Cahaya Madani, selain pengembangan kurikulum

mandiri juga melalui adopsi. Pihak yang bertanggung jawab menyusun kurikulum non-akademik adalah tim khusus sekolah dan pembina asrama.

Guru pembina khusus atau pembina asrama bertanggung jawab terhadap pembinaan peserta didik di asrama. Pembina asrama dan siswa tinggal di lingkungan sekolah, kecuali SMKN 2 Pandeglang di mana tidak semua siswa tinggal di asrama karena kamar asrama yang terbatas dan hanya dikhususkan bagi siswa yang jauh. SMKN 2 Pandeglang kini hanya memiliki 11 murid yang tinggal di asrama. Hal itu terjadi dapat dijelaskan dari sejarah berdirinya sekolah tersebut. Pada awalnya, SMKN 2 Pandeglang merupakan sekolah di bidang pertanian. Banyak siswa yang berasal dari wilayah selatan, yang memang merupakan daerah pertanian. Wilayah selatan memiliki lokasi cukup jauh dari SMKN 2 Pandeglang. Maka, banyak siswa yang tinggal di asrama. Seiring perkembangan zaman, produksi pertanian menurun di wilayah selatan, sehingga banyak siswa SMKN 2 Pandeglang dari wilayah selatan semakin berkurang. Melihat kondisi tersebut, karakter pertanian dalam SMKN 2 Pandeglang kemudian diubah menjadi



sekolah bidang teknik. Siswa pun kemudian lebih banyak yang berasal dari perkotaan, sehingga kamar-kamar asrama menjadi kosong. Banyak kamar asrama yang diubah fungsinya menjadi ruang kelas atau ruang praktikum. Hingga saat ini hanya ada 11 siswa yang tinggal di asrama.

Selain fenomena perkembangan itu, ternyata banyak siswa SMKN 2 Pandeglang yang berasal dari luar daerah lebih senang menginap di pesantren-pesantren sekitar sekolah. Kondisi ini terjadi karena banyak orang tua yang ingin anaknya dapat belajar ilmu agama selain ilmu pengetahuan akademik. Sehingga walaupun anak-anak mereka bersekolah di SMKN 2 Pandeglang, tetapi mereka lebih memilih untuk tinggal di pesantren daripada di asrama sekolah. Tentunya, nilai-nilai keagamaan ini begitu kental di daerah Banten yang secara langsung mendukung model sekolah di daerah tersebut.

Peran pembina asrama sangat penting dalam konsep sekolah berasrama, dimana tugas mereka adalah memberikan bimbingan peserta didik, membantu kesulitan belajar peserta didik, memberikan sanksi pelanggaran, dan membimbing kemandirian siswa.

Ketiga sekolah sudah memberikan tugas-tugas tersebut kepada pembina asrama di sekolah mereka. Dalam rangka pembinaan peserta didik di asrama, terdapat beberapa strategi yang berbeda di antara sekolah. Pada SMAN Cahaya Madani, terdapat pertemuan peserta didik dan pembina asrama selama dua kali dalam satu minggu. Selain itu, terdapat sesi konsultasi peserta didik dan pembina asrama selama satu kali dalam satu minggu. Sedangkan SMA Nurul Fikri, terdapat pertemuan peserta didik dan pembina asrama selama dua kali dalam satu bulan, karyawan asrama selama dua kali dalam satu bulan, dan sesi konsultasi peserta didik dan pembina asrama yang bisa terjadi hampir setiap hari. SMKN 2 Pandeglang, juga hampir sama dengan dua sekolah lainnya, yaitu terdapat pertemuan peserta didik dan pembina asrama yang dapat dilakukan setiap saat dan *home visit* ibu asrama ke rumah siswa. Untuk *home visit* ini dapat dilakukan karena memang jumlah siswa yang tinggal di asrama SMKN 2 Pandeglang hanya 11 orang. Namun, metode ini cukup baik untuk membangun kedekatan emosional antara siswa dan pembina asrama. Peraturan asrama biasanya disebarluaskan melalui buku saku, papan pengumuman, dan

sosialisasi berkala. Namun untuk SMA Nurul Fikri juga bisa dilihat di web yayasan.

Strategi penanaman nilai-nilai karakter di sekolah dan asrama di SMAN Cahaya Madani melalui ibadah rutin, seperti sholat wajib berjamaah, tahajud, tausiyah, dan lainnya. Untuk sekolah SMA Nurul Fikri lebih kepada pemberian pemahaman dalam pertemuan asrama secara rutin, dengan keteladanan dari pembina asrama, dan pelibatan dalam kegiatan keasramaan. Konsep keteladanan menjadi penting di era pendidikan modern saat ini, tindakan dan perilaku guru atau pembina asrama dapat menjadi contoh bagi peserta didik. Metode “lakukan seperti apa yang saya katakan, tidak seperti yang saya lakukan”, bukan cara tepat untuk mengajarkan nilai-nilai. Guru harus mampu memberikan contoh, bersikap adil, konsisten, dan mampu berkomunikasi baik dengan siswa. Siswa percaya bahwa apa yang dilakukan seorang guru sangat penting daripada apa yang dikatakan guru. Dengan kata lain, tindakan nyata guru harus lebih jelas dari sekedar “suara yang keras”. Sedangkan untuk SMKN 2 Pandeglang, strategi penanaman nilai karakter dilakukan melalui pembiasaan sesuai jadwal,

melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kepramukaan.

### **3. Manajemen Sekolah**

#### **a. Sumber Daya Manusia (Kepala Sekolah, Guru, Pembina Asrama, dan Peserta Didik)**

Kualifikasi pendidikan kepala sekolah di SMAN Cahaya Madani dan SMKN 2 Pandeglang minimal S2, sedangkan SMA Nurul Fikri minimal S1. Pertimbangan lain dalam menyeleksi kepala sekolah di SMAN Cahaya Madani adalah pengalaman dan status kepegawaian. SMA Nurul Fikri lebih melihat kepada faktor pengalaman dan prestasi selama bekerja, sedangkan SMKN 2 Pandeglang adalah faktor pengalaman dan kemampuan dalam manajemen sekolah. Mekanisme pengangkatan kepala sekolah di SMAN Cahaya Madani dan SMA Nurul Fikri adalah melalui penunjukan langsung oleh pemerintah atau yayasan, sedangkan di SMKN 2 Pandeglang melalui seleksi terbuka. Kinerja kepala sekolah dievaluasi berdasarkan indikator mutu sekolah, dan ini berlaku di ketiga sekolah. Hanya saja, untuk SMKN 2 Pandeglang, kinerja

kepala sekolah tidak hanya dievaluasi berdasarkan indikator mutu sekolah, namun juga dari jumlah peserta didik yang mendaftar, dan jumlah prestasi peserta didik.

Kualifikasi pendidikan untuk guru minimal S1 dan ini berlaku untuk ketiga sekolah. Pertimbangan lain dalam menyeleksi guru terdapat sedikit perbedaan antarsekolah. Untuk SMAN Cahaya Madani, hasil tes akademik dan latar belakang pendidikan menjadi faktor dalam menyeleksi guru. Bagi SMA Nurul Fikri dan SMKN 2 Pandeglang, faktor-faktor seperti hasil tes akademik, pengalaman, dan latar belakang pendidikan harus menjadi syarat penting dalam menyeleksi guru.

Pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja guru, berbeda di setiap sekolah. Pada SMAN Cahaya Madani, evaluasi dilakukan melalui supervisi PKG dan KBM. SMAN Cahaya Madani melihat dari hasil supervisi dan hasil evaluasi guru setiap semester dari kemampuan akademik, pedagogik, Bahasa Inggris, dan penguasaan pengetahuan umum, berakhlak baik dan mampu bekerja sama,

angket dari siswa. Bagi SMKN 2 Pandeglang, evaluasi kinerja guru cukup melalui supervisi oleh tim yang ditunjuk oleh kepala sekolah.

Kualifikasi pendidikan pembina asrama di SMAN Cahaya Madani harus minimal S1, di SMA Nurul Fikri cukup dengan D2, sedangkan SMKN 2 Pandeglang minimal S2. Latar belakang pendidikan dan pengalaman menjadi pertimbangan lain dalam menyeleksi pembina asrama. Hanya saja di SMA Nurul Fikri, pengetahuan wawasan Islam dan akhlak juga menjadi prioritas utama bagi pembina asrama. Kendala teknis dan nonteknis yang dihadapi pembina asrama di tiga sekolah ternyata berbeda-beda. Bagi SMAN Cahaya Madani, kendala yang perlu dicarikan solusinya adalah ketidakjelasan status pegawai, tingkat kesejahteraan, rasio antara pembina asrama dan peserta didik, dan kompetensi pembina asrama. Sedangkan bagi SMA Nurul Fikri, kendala-kendala yang muncul adalah tentang kerusakan sarana dan prasarana, komunikasi dengan orang tua siswa, pelanggaran siswa yang terjadi di asrama, dan pola komunikasi

dan sosialisasi siswa yang beragam. Sedangkan SMKN 2 Pandeglang, kendala teknis yang dihadapi adalah kemampuan tenaga pembina asrama, dan kendala nonteknis adalah pembiayaan.

Pada SMAN Cahaya Madani, mekanisme penerimaan peserta didik adalah seleksi nilai UN, seleksi nilai rapor, penelusuran minat dan bakat, dan ujian masuk mandiri. Untuk SMA Nurul Fikri hanya dengan ujian masuk mandiri. Bagi SMKN 2 Pandeglang nampaknya lebih bervariasi, yaitu seleksi nilai rapor, penelusuran minat dan bakat, dan ujian masuk mandiri. Untuk proporsi penerimaan peserta didik, di SMAN Cahaya Madani, bagi siswa yang tidak mampu mendapatkan porsi sebesar 30%, dan peserta didik yang berprestasi mendapatkan porsi sebesar 70%. Hal ini dapat menjelaskan bahwa SMAN Cahaya Madani memang sekolah unggulan yang mengedepankan pengetahuan akademik dan didukung oleh pendidikan agama. SMA Nurul Fikri tidak memberikan batasan dalam proporsi penerimaan peserta didik, kecuali kuota putra dan

putri sesuai sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan SMKN 2 Pandeglang, memberikan porsi 21% bagi peserta didik yang tidak mampu, 6% bagi peserta didik berprestasi, dan 73% untuk peserta didik jalur reguler.

Strategi meningkatkan mutu/kualitas peserta didik di sekolah dan asrama pada SMAN Cahaya Madani adalah: pembinaan olimpiade; pengembangan minat dan bakat; program *TOEFL Preparation*; pembinaan organisasi siswa; dan pembinaan tahfidz Qur'an minimal 3 juz. Sedangkan bagi SMA Nurul Fikri adalah model tutor sebaya di sekolah, sedangkan di asrama antara dua siswa dipersaudarakan tujuannya agar saling membantu, bimbingan dari wali kelas, guru BK dan pembina asrama dalam penyelesaian permasalahan siswa juga dalam peningkatan potensi siswa, mentoring dalam kelompok kecil dimana setiap 10 orang diberikan 1 mentor yang berperan memonitoring aktivitas keseharian siswa sehingga memudahkan untuk evaluasi. Bagi SMKN 2 Pandeglang, strategi meningkatkan mutu/kualitas peserta didik di sekolah dan asrama



adalah: menyusun jadwal pelajaran dengan baik dan pelaksana yang baik; pembiasaan program literasi yang terus terprogram; penerapan disiplin dan program pemantapan.

#### **b. Sarana dan Prasarana Sekolah**

Sumber pengadaan sarana dan prasarana SMAN Cahaya Madani berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Mekanisme perawatan sarana dan prasarana sekolah adalah pengecekan sarpras secara periodik, sarpras yang rusak diupayakan perbaikan, pengadaan sarpras melalui PPTK. SMA Nurul Fikri memiliki sumber pengadaan sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sumbangan orang tua, sedangkan mekanisme perawatan sarana dan prasarana sekolah adalah terdapat penanggung jawab sarana dengan beberapa teknisi yang melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap kerusakan. Untuk SMKN 2 Pandeglang, sumber pengadaan sarana dan prasarana berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sumbangan orang tua. Sedangkan, mekanisme perawatan sarana dan

prasarana sekolah adalah memperbaiki sarana prasarana yang terlihat langsung kondisi buruk dan merawat sarana dan prasarana sesuai jenis dan jadwal.

**c. Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan di SMAN Cahaya Madani, yaitu:

- 1) Sumber penerimaan sekolah tahun 2016/2017 sebesar Rp415.800.000,00 berasal dari BOS pusat.
- 2) Kegiatan belajar mengajar (3,08%), konsumsi (40%), gaji dan tunjangan (12,6%), pengadaan sarpras (23,65%), perawatan sarpras (20,66%).
- 3) Biaya yang dibutuhkan untuk membiayai keseluruhan proses KBM dan biaya hidup rutin per peserta didik adalah Rp2.477.218,00/peserta didik/bulan pada tahun 2017.

Pembiayaan pendidikan di SMA Nurul Fikri, yaitu:

- 1) Sumber penerimaan sekolah tahun 2016/2017 sebesar Rp511.000.000,00 berasal dari BOS

pusat, dan Rp720.542.800,00 dari yayasan sekolah.

- 2) Biaya yang dibutuhkan untuk membiayai keseluruhan proses KBM dan biaya hidup rutin per peserta didik adalah Rp2.750.000,00/peserta didik/bulan.

Pembiayaan pendidikan di SMKN 2 Pandeglang, yaitu:

- 1) Sumber penerimaan sekolah tahun 2016/2017 sebesar Rp3.095.400.000,00 berasal dari BOS pusat.
- 2) Biaya yang dibutuhkan untuk membiayai keseluruhan proses KBM dan biaya hidup rutin per peserta didik adalah Rp2.550.000,00/peserta didik/bulan.

Pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Pandeglang, yaitu:

- 1) Sumber penerimaan sekolah tahun 2016/2017 sebesar Rp323.700.000,00 berasal dari BOS pusat.
- 2) Kegiatan belajar mengajar (8%), konsumsi (42%), gaji dan tunjangan (13%), pengadaan sarpras (22%), perawatan sarpras (15%).

- 3) Biaya yang dibutuhkan untuk membiayai keseluruhan proses KBM dan biaya hidup rutin per peserta didik adalah Rp2.257.000,00/peserta didik/bulan pada tahun 2017.

**d. Kerja Sama dengan Pihak Luar**

Kerja sama dengan pihak luar di SMAN Cahaya Madani, yaitu:

- 1) Bidang penerapan kurikulum pembelajaran bekerja sama dengan STKIP Yohannes Surya, dalam bentuk adopsi kurikulum dari 2007 hingga sekarang.
- 2) Bidang pengembangan kemampuan non akademik bekerja sama dengan Pondok Pesantren Gontor dalam bentuk adopsi kurikulum asrama, bahasa, dan kedisiplinan.
- 3) Pengembangan SDM bekerja sama dengan Bimbel Nurul Fikri (NF) dalam bentuk penguatan materi pelajaran dari tahun 2008 hingga sekarang.

Kerja sama dengan pihak luar di SMA Nurul Fikri, yaitu:

- 1) Bidang penerapan kurikulum pembelajaran bekerja sama dengan lembaga swasta dalam pelatihan supervisor KBM, bekerja sama juga dengan dinas pendidikan dalam bentuk guru sasaran dan insfrastruktur nasional.
- 2) Bidang pengembangan kemampuan non akademik bekerja sama dengan kampus dalam hal kunjungan kampus yang rutin setiap tahun, bekerja sama dengan ESQ dalam hal training motivasi, bekerja sama dengan Yayasan Ibu dan Buah Hati dalam training materi.
- 3) Pembiayaan sekolah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dalam hal sponsor kegiatan lomba oleh siswa.
- 4) Pengembangan SDM bersifat personal, narasumber dalam pelatihan SDM.
- 5) Pengembangan fasilitas bekerja sama dengan dinas pendidikan dalam hal pembangunan laboratorium IPA, pengadaan komputer, dan lain-lain.

Kerja sama dengan pihak luar di SMKN 2 Pandeglang, yaitu:

- 1) Sekolah bekerja sama dengan beberapa instansi.
- 2) Bidang penerapan kurikulum pembelajaran bekerja sama dengan dunia industri dalam bentuk sinkronisasi kurikulum, rekrutmen pegawai, dan MoU produk kerja lapangan.

Kerja sama dengan pihak luar di SMKN 4 Pandeglang, yaitu:

- 1) Bidang penerapan kurikulum pembelajaran bekerja sama dengan dunia industri dalam bentuk sinkronisasi kurikulum, pelatihan siswa, dan penjualan produk.
- 2) Sekolah bekerja sama dengan beberapa instansi dalam hal pengadaan sarana prasarana, kurikulum, pendanaan, dan sebagainya.

## **C. Provinsi Kalimantan Barat**

### **1. Kebijakan Daerah**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki kebijakan khusus tentang sekolah berasrama. Namun, pemerintah memiliki kebijakan afirmasi untuk pendidikan menengah, yaitu dengan memberi

beasiswa kepada 50 orang dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat untuk bersekolah di SMA/SMK di Kota Pontianak secara gratis dan mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi. Porsi untuk SMA 30 siswa dan SMK 20 siswa. Siswa-siswa ini dipilih oleh masing-masing dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat berdasarkan prestasi dan latar belakang ekonomi orang tua. Masing-masing kabupaten/kota diberikan kuota yang berbeda, namun dinas provinsi memprioritaskan kabupaten yang berkategori 3T.

Di Pontianak, siswa-siswa ini akan diasramakan dengan menyewa gedung dari pihak swasta. Karena keterbatasan gedung, maka asrama sewaan ini berada di dua lokasi yang berbeda. Mereka memperoleh makan/minum 3 kali sehari dan diberikan penanggung jawab asrama yang tidak tinggal di lokasi yang sama. Penanggung jawab ini bertugas memantau kegiatan siswa, menerima keluhan-keluhan, dan berkomunikasi dengan orang tua siswa. Praktis, asrama tersebut hanya menjadi tempat tinggal siswa dan tidak ada kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat terpadu. Kegiatan-kegiatan pembinaan yang terorganisir

mengikuti sekolah masing-masing. Pada tahun depan kuota untuk program afirmasi ini akan ditambah hingga 200 orang setiap angkataannya.

## **2. Nilai-Nilai Sekolah**

Empat sekolah peserta DKT mewakili dua kategori: sekolah akses (SMAN 2 Sekayam dan SMK Panca Bhakti) dan sekolah unggulan (SUPM Negeri Pontianak dan SPP SPMA Singkawang). Keempat sekolah tersebut sama-sama mengunggulkan nilai-nilai keilmuan dan pluralisme sebagai *platform* sekolah. Namun, untuk SUPM dan SPP SPMA, nilai-nilai kedisiplinan ala taruna juga cukup menonjol. Siswa-siswa di kedua sekolah terakhir ini memiliki seragam dengan simbol kepangkatan di pundak yang menandakan kelas mereka.

## **3. Kurikulum dan Sistem Pengasuhan**

Untuk SMAN 2 Sekayam dan SMK Panca Bhakti, kurikulum pembelajaran yang digunakan adalah KTSP 2006. Sedangkan SUPM dan SPP SPMA mengombinasikan kurikulum internal mereka yang berorientasi pada *skill* yang spesifik di satu sisi dengan KTSP 2006 untuk kepentingan akreditasi dan



menyiapkan anak-anak mengikuti Ujian Nasional di sisi lain. Kedua sekolah ini bahkan menyiapkan dua macam ijazah: satu ijazah kelulusan reguler standar Kemendikbud dan ijazah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (SUPM) dan Kementerian Pertanian (SPP SPMA).

Sistem pengasuhan di SUPM dan SPP SPMA sangat terstandar. Di SUPM bahkan sistem pengasuhannya diatur melalui Peraturan Kepala Badan Litbang Kementerian KKP di Jakarta. Sementara di SPP SPMA, melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah yang merujuk pada Peraturan Kepala BPSDM Kementerian Pertanian. Kedua sekolah itu memiliki wali asrama yang ditunjuk secara khusus untuk mendampingi dan bertanggung jawab atas kehidupan para siswa di asrama. Mereka pula yang memberikan penilaian atas kedisiplinan siswa. Aktivitas siswa sangat terjadwal, sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Kegiatan pembinaan keagamaan dilakukan secara rutin dan fasilitas ibadah disediakan bagi penganut Islam, Kristen, dan Katholik. Selain itu juga terdapat kegiatan ekstrakurikuler seperti aktivitas olahraga dan

kesenian. Para pelatih olahraga didatangkan dari luar sekolah dengan biaya sekolah.

Sementara itu, di dua sekolah akses SMK Panca Bhakti dan SMAN 2 Sekayam, kegiatan pengasuhan juga dilakukan meski dengan penuh keterbatasan. Pada kedua sekolah tersebut tidak semua siswa diasramakan. Siswa berasrama dipilih berdasarkan jarak rumah dari sekolah. Guru-guru pembina asrama diambilkan dari mereka yang masih lajang dan mau tinggal di asrama. Namun untuk konseling, tetap dilakukan oleh BK. Para siswa yang tinggal di asrama juga mencari makan sendiri-sendiri di luar sekolah, pembinaan asrama di SMAN 2 Sekayam masih lebih terorganisir. Demikian, pembinaan keagamaan juga tetap dilakukan. Di SMAN 2 Sekayam, para siswa melaksanakan kegiatan ibadah agama secara terjadwal sesuai agama masing-masing. Komposisi siswanya adalah 40% Katholik, 30% Kristen, dan 30% Muslim. Untuk Muslim, shalat berjamaah lima waktu, sementara setiap hari minggu, didatangkan pendeta dan pastor untuk melayani ibadah siswa Katholik (pagi) dan Kristen (malam). Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler juga sangat aktif, terutama di bidang

olahraga. SMAN 2 Sekayam sering meraih juara dalam beberapa kompetisi olahraga seperti voli dan takraw. Selain itu, sekolah ini juga dua kali menyabet gelar sekolah sehat di tingkat kabupaten dan provinsi.

#### **4. Manajemen Sekolah**

##### **a. Sumber Daya Manusia (Kepala Sekolah, Guru, Pembina Asrama, dan Peserta Didik)**

Seluruh kepala sekolah dan guru di keempat sekolah ini memiliki gelar minimal S1, sedangkan pembina asrama ada yang lulusan SMA. Kecuali untuk para pelatih olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya, latar belakang pendidikan tidak terlalu dipentingkan karena mereka merekrut berdasarkan keterampilan dan pengalaman.

Untuk peserta didik, sekolah-sekolah akses (SMAN 2 Sekayam dan SMK Panca Bhakti) menerapkan seleksi yang sangat longgar. Hal ini karena mereka bertujuan melayani siapapun yang berkeinginan untuk bersekolah. Bahkan hampir seluruh pendaftar diterima di sekolah. Satu-satunya syarat adalah memiliki ijazah SMP. Sekolah hanya menyeleksi siswa-siswa yang dapat

tinggal di asrama. Hal ini karena keterbatasan sarana asrama. Dalam hal ini sekolah memprioritaskan mereka yang tinggalnya jauh dari sekolah untuk diasramakan.

Sementara itu, sekolah-sekolah unggulan menerapkan seleksi yang cukup ketat kepada para siswa yang diterima. Selain pendaftaran yang dilakukan secara *online* dan nilai raport, sekolah juga melakukan tes tertulis kepada calon siswa. Namun demikian, sekolah juga menerapkan *affirmative policy* kepada siswa-siswa tertentu. SUPM misalnya, memberikan kelonggaran seleksi kepada siswa dari keluarga pelaku utama perikanan seperti anak nelayan. Kementerian KKP menetapkan bahwa 46% siswa yang diterima di sekolah SUPM di seluruh Indonesia adalah anak-anak dari pelaku utama tersebut. Meski prosedur penerimaannya tetap sama, namun seleksinya dibuat lebih longgar untuk anak-anak ini.

#### **b. Sarana dan Prasarana Sekolah**

Para kepala sekolah unggulan (SUPM dan SPP SPMA) mengakui bahwa sarana dan prasarana sekolah mereka terhitung sangat lengkap. Semua

lahan dan fasilitas belajar, praktikum, dan kegiatan ekstrakurikuler sudah memadai. Bahkan SUPM memiliki dua buah kapal bernilai milyaran rupiah yang digunakan untuk para siswa melakukan praktik nautika di lautan lepas. Fasilitas rumah ibadah juga cukup lengkap, yaitu masing-masing sekolah memiliki masjid dan kapel.

Hal bertolak belakang dialami oleh sekolah akses, SMAN 2 Sekayam dan SMK Panca Bhakti. Namun, SMAN 2 Sekayam masih jauh lebih beruntung karena memiliki lahan seluas hampir 30 ribu m<sup>2</sup> dan memiliki 3 kompleks asrama untuk putra dan putri. Meskipun, jumlah asrama tidak bisa menampung seluruh siswa yang ada sehingga dari 702 siswa, hanya 106 yang dapat tinggal di asrama. Sementara itu, fasilitas SMK Panca Bhakti tergolong memprihatinkan. Kepala sekolah menyewakan beberapa rumah di sekitar sekolah sebagai tempat tinggal para siswa. Bahkan beberapa siswa harus tinggal di salah satu ruangan rumah kepala sekolah dan harus tidur di ruang tamu rumah tersebut saat malam.

### **c. Pembiayaan Pendidikan**

Sumber utama pembiayaan pendidikan adalah dari pemerintah. Untuk dua sekolah unggulan, pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, yaitu Dinas Pertanian Provinsi (SPP SPMA Singkawang) dan Kementerian KKP (SUPM Negeri Pontianak). Hal ini membuat siswa tidak membayar apapun ke sekolah. Kecuali di SPP SPMA Singkawang, orang tua ditarik kontribusi Rp20.000,00 per bulan, namun uang tersebut disetor ke kas Dinas Pertanian Provinsi dan tidak dikelola oleh sekolah. Selain itu, SPP SPMA juga menerima dana BOS, Bansos dan DAK dari pemerintah.

Sementara itu, SUPM menolak menerima dana BOS karena kesulitan dalam pelaporannya. Namun, SUPM mendapat bantuan dari Direktorat SMK Kemendikbud berupa pembangunan gedung dan penambahan sarpras lainnya. SUPM termasuk yang paling besar pembiayaannya karena setiap tahun ia menerima sekitar 17-18 milyar dari Kementerian KKP. Dana ini mencakup seluruh

pembiayaan operasional sekolah, belanja pegawai, dan kebutuhan personal siswa.

Sementara itu, SMAN 2 Sekayam dan SMK Panca Bhakti banyak bersandar pada dana pemerintah pusat melalui dana BOS. SMAN 2 Sekayam juga menarik dana rutin Rp70.000,00 per bulan dari orang tua siswa untuk operasional asrama. Selain itu, juga ada dana DAK dan Bansos. Beberapa siswa juga memperoleh BSM dan PIP dari pemerintah. Sekolah juga tidak menanggung uang makan siswa dan siswa dibebaskan untuk memasak atau membeli makan di sekitar sekolah.

Setali tiga uang, SMK Panca Bhakti juga mengandalkan dana BOS dan Bansos untuk pembiayaan sekolah. Orang tua juga memberi kontribusi sukarela sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, sebagian besar siswa juga menerima dana PIP dan BSM.

#### **d. Kerja Sama dengan Pihak Luar**

Kecuali SMK Panca Bhakti, sekolah-sekolah berasrama memiliki kerja sama dengan pihak luar, terutama dari dunia industri dan usaha. SUPM dan

SPP SPMA misalnya, banyak menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan pelayaran dan perikanan baik nasional maupun internasional dalam hal program magang, pelatihan, dan rekrutmen tenaga kerja. Mereka memiliki MoU untuk kerja sama tersebut. Sementara itu, SMA 2 Sekayam mendapatkan bantuan dari PT Asabri untuk pengembangan sarana dan prasarana asrama.

## **D. Provinsi Jawa Tengah**

### **1. Kebijakan Daerah**

Berdasarkan informasi dari Bappeda Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi, pemerintah menegaskan melalui perencanaan yang baik tahun 2018 pasti ada anggaran untuk sekolah berasrama termasuk menambah dari sarprasnya, asrama juga. Harapannya, bukan hanya tiga sekarang tapi juga di beberapa wilayah didorong untuk didirikan lagi pola *boarding* seperti sekolah asrama tapi menggunakan sekolah yang sudah ada yang memiliki lahan yang luas lalu dibangun asrama. Apakah nanti akan untuk semua siswa ataukah hanya untuk keluarga miskin. Jadi ada



yang reguler atau ada yang tertentu karena untuk menyediakan penginapan yang jauh dari keluarga miskin. Jadi sekolah yang sudah ada sebaiknya didirikan asrama bagi anak-anak yang tidak mampu. Kondisi tahun 2017 total biaya yang dianggarkan untuk membantu seluruh sekolah berasrama di Provinsi Jawa Tengah sebesar 11 milyar untuk SMK berasrama di Purbalingga, sebesar 13 milyar untuk sekolah berasrama di Semarang dan sebesar 9 milyar untuk sekolah berasrama negeri di Pati.

## **2. Nilai-Nilai Sekolah**

Empat sekolah peserta FGD mewakili tiga kategori: sekolah akses (SMK Negeri Jawa Tengah dan SMK Negeri 1 Bawen), sekolah ketarunaan (SMA Taruna Nusantara), dan sekolah unggulan (SMA Semesta). Keempat sekolah tersebut mengunggulkan nilai-nilai keilmuan, ketarunaan, dan kepemimpinan sebagai *platform* sekolah. Khusus untuk SMA Taruna Nusantara dibentuk untuk mendidik siswa secara militer agar memiliki disiplin tinggi dan memiliki daya saing intelektualitas pada level nasional dan internasional.

### 3. Kurikulum dan Sistem Pengasuhan

SMA Taruna Nusantara menggunakan Kurikulum 2013 dan kurikulum khusus SMA TN. Ada pelajaran khusus tetapi lebih banyak mata kegiatan yaitu kegiatan rutin terjadwal yang itu kemudian diikuti suatu sistem pengasuhan atau kurikulum pengasuhan, kemudian ditambah kegiatan-kegiatan terprogram kemudian ada dalam satu kurikulum tersendiri itu namanya kurikulum khusus walaupun itu kemudian juga termasuk ke bagian KTSP. Strategi dalam meningkatkan kualitas peserta didik baik bidang akademik maupun non akademik, dilakukan dari hasil evaluasi itu kemudian dilakukan pemetaan siswa karena kemampuan para siswa SMA TN sangat heterogen. Berdasarkan hasil evaluasi dilakukan kategori para siswa tersebut untuk kemudian diberikan *treatment* sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Baik itu berupa matrikulasi, remediasi, *enrichment*/pengayaan. Sehingga peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan itu dapat mencapai standar yang ditentukan. Kurikulum pembelajaran di SMK Negeri 1 Bawen sudah menggunakan Kurikulum 2013 penuh untuk semua

kelas dengan yang non-akademik ini diinventarisasi bakat minat peserta didik dalam wadah ekstrakurikuler ada 22 cabang ekskul jadi setiap hari antara jam 15.30 sampai 17.00 semua ekskul karena lima hari kerja. Kemudian sistem pengasuhannya untuk yang di asrama ini juga yang membimbing di asrama guru yang bukan PNS yang notabenenya juga memerlukan penginapan sekalian untuk juga bisa membina peserta didiknya. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan mutu menganut Permendiknas yaitu tentang penilaian untuk yang akademik ini juga sekarang sudah menggunakan istilah baru yaitu PAS kemudian akhir semester nilai-nilai untuk ekskul ini juga harus sudah diberikan. Mengenai kurikulum pembelajaran SMA Semesta menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge internasional. Sebagai SPK memang memiliki hak untuk menggunakan kurikulum internasional, hanya digunakan untuk mata pelajaran Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Selanjutnya untuk SMK Negeri Jawa Tengah menggunakan Kurikulum 2013 dan kurikulum khusus yang mengadopsi dari SMA Taruna Nusantara.

#### **4. Manajemen Sekolah**

##### **a. Sumber Daya Manusia (Kepala Sekolah, Guru, Pembina Asrama, dan Peserta Didik)**

Seluruh kepala sekolah dan guru di keempat sekolah ini memiliki gelar minimal S1. Pertimbangan utama pemilihan kepala sekolah di Provinsi Jateng adalah melalui diklat calon kepala sekolah dan diangkat oleh Gubernur. Berbagai macam cara dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas kepala sekolah antara lain pelatihan manajerial, pelatihan pengembangan kurikulum, pelatihan ICT, dan sebagainya. Kinerja kepala sekolah dievaluasi melalui indikator mutu sekolah, jumlah prestasi peserta didik, dan banyaknya siswa yang mendaftar. Untuk guru sekolah berasrama di Provinsi Jawa Tengah memiliki kualifikasi pendidikan minimal adalah S1 dengan pertimbangan penerimaan berdasarkan hasil tes akademik, pengalaman dan wawancara. Mekanisme pengangkatan guru dilakukan melalui seleksi terbuka dan ada pula yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Selanjutnya terkait dengan pembina asrama, memiliki kualifikasi

pendidikan minimal adalah S1 yang dinilai berdasarkan pengalaman, latar belakang pendidikan dan sikap. Mekanisme pengangkatan pembina asrama di sekolah berasrama di Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui seleksi terbuka dan ada pula yang melalui penunjukan langsung oleh kepala sekolah. Untuk peserta didik, sekolah-sekolah menerapkan seleksi yang cukup ketat kepada para siswa yang diterima. Selain pendaftaran yang dilakukan secara *online* dan nilai rapor, sekolah juga melakukan tes tertulis kepada calon siswa. Selain itu ada pula kunjungan ke rumah oleh sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa siswa tersebut layak memperoleh beasiswa.

#### **b. Sarana dan Prasarana Sekolah**

Berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah berasrama di Provinsi Jateng, pengadaannya dilakukan melalui pemerintah pusat, provinsi, sumbangan orang tua, bantuan CSR dan kementerian/lembaga lainnya. SMA Semesta memiliki luas sekitar 5 ha, sekolah ini satu atap selain SMA Semesta ada juga SMP yang sama dan juga asrama. Mengenai kondisi sarpras sudah

cukup memadai. Sekolah memiliki dua gedung untuk putra putri juga asrama. Kondisi sarana dan prasarana SMK Negeri Jateng masih lengkap karena kondisi asrama barang baru dan cukup memadai, satu kamar berisi 8 siswa, kondisi baru dan bahkan satu lantai belum selesai untuk tahun ini. Untuk SMKN 1 Bawen basisnya pertanian dan pariwisata dengan luas lahan 9,8 ha. Pada tahun 1990 didirikan asrama ada enam gedung tapi hanya untuk penginapan karena belum dikelola dengan jaminan makan dan lainnya. Ada enam bangunan untuk asrama sebetulnya hanya penginapan karena kita memang mengawasi guru yang belum PNS yang butuh penginapan jumlahnya per kamar ada 4 siswa, jumlah kamarnya ada 16 kali 4, tetapi biasanya bisa terisi sampai 120. Kondisi fisik SMA Taruna Nusantara punya 24 ha, tapi statusnya pinjaman dari TNI dan tidak tahu ditagih sampai kapan. Kelengkapan sarpras cukup lengkap. Sampai sekarang sekolah sedang membangun perkantoran, kelas, dan dua buah asrama putra dan putri.

### **c. Pembiayaan Pendidikan**

Untuk kontribusi pembiayaan SMA Semesta, hampir semua ditanggung oleh orang tua siswa. Meskipun sampai saat ini kami masih menerima dana BOS dari pemerintah provinsi dan kota. Pembiayaan SMK Negeri Jateng dianggarkan dari APBD pemerintah provinsi dan bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat, ada perusahaan-perusahaan lain yang memberikan seperti Bank Jateng memberikan juga bantuan berupa pakaian olahraga. Pembiayaan yang berkontribusi yang ada di SMK Negeri 1 Bawen dan asrama mendapat dana BOS pusat, BOSDA, dan khusus bantuan siswa pertanian Rp1.000.000,00 per tahun yang sekarang menjadi PIP tapi semua siswa pertanian itu dapat. Sekitar 1600-an siswa yang pertanian, perhotelan dan tataboga tidak mendapat bantuan. Dananya dari APBN. Pembiayaan di SMA Taruna Nusantara tidak ada kontribusi lain dari orang tua kecuali BOS pusat kira-kira dua persen dari alokasi anggaran per tahun karena sekitar 70 milyar per tahun.

#### **d. Kerja Sama dengan Pihak Luar**

SMA Semesta telah bekerja sama dengan pihak luar seperti Cambridge dengan National Geographic, juga bekerja sama dengan universitas seperti UNNES dan UNDIP terutama untuk bimbingan olimpiade dan karya ilmiah untuk anak-anak. Kemudian juga masih sering pelatihan bareng olimpiade dengan beberapa sekolah yang lain. Berkaitan dengan kerja sama dengan pihak luar, SMK Negeri 1 Bawen bekerja sama dengan perusahaan di Kalimantan yaitu KPP Grup Samarinda. Kerja sama dengan pihak luar bagi SMA Semesta terutama dalam penyerapan lulusan terbesar diambil PT Pama, Komatsu, PT Hitachi.

### **E. Kebijakan Strategis**

Mendirikan sekolah berasrama di Indonesia dapat dikatakan mudah dan sulit. Disebut mudah karena Indonesia memiliki banyak referensi sekolah berasrama yang telah berdiri di Indonesia dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing. Sekolah-sekolah berasrama unggulan banyak bermunculan dan menjadi ikon di banyak daerah. Di sisi lain, dapat pula dikatakan susah karena mendidik



siswa di asrama itu sendiri memerlukan komitmen yang tinggi, bukan hanya dari pemerintah dan para pendidik namun juga dari para peserta didik dan keluarga mereka. Mereka yang ingin mendirikan sekolah berasrama perlu mengeluarkan investasi yang besar karena porsi pendidikan terbesar bukan ada pada jam kelas regulernya, namun pada jam-jam di luar kelas. Selain itu, diperlukan pula rencana jangka panjang yang matang sehingga sekolah ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Meskipun sekolah berasrama telah menjadi bagian dari tradisi pendidikan Indonesia, namun ia bukanlah sistem pendidikan arus utama sehingga masih banyak pihak yang belum memahami potensi dan konsekuensinya. Bagian ini akan menjelaskan beberapa alternatif strategi pendirian sekolah berasrama dan sumber daya apa dan mana saja yang perlu dilibatkan dalam proses ini.

## **1. Strategi Pendirian**

Untuk menginisiasi pendirian sistem sekolah berasrama sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, ada empat macam strategi yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga swasta. Empat macam strategi itu adalah: revitalisasi sekolah berasrama yang telah ada,

restrukturisasi sekolah reguler, kerja sama dengan lembaga pendidikan berasrama non-formal, dan pendirian unit sekolah berasrama baru. Secara ringkas, keempat strategi tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4.1. Namun, uraian lebih lanjut akan diberikan di bawahnya.

**Tabel 4.1 Strategi Pendirian Sekolah Berasrama**

<b>Strategi</b>	<b>Keluaran Lembaga</b>	<b>Sasaran Prioritas</b>
Revitalisasi	Sekolah dan asrama lama	Sekolah-sekolah berasrama negeri
Restrukturisasi	Sekolah lama, asrama baru	Sekolah-sekolah reguler eks-RSBI
Kolaborasi	Sekolah baru, asrama lama	Pesantren pengelola madrasah formal
Invensi	Sekolah dan asrama baru	Daerah-daerah di mana 3 strategi di atas tidak mungkin dilakukan

#### **a. Revitalisasi**

Revitalisasi sekolah berasrama yang telah ada berarti mempertahankan dan meningkatkan yang baik dan memperbaiki yang kurang baik dari sekolah-sekolah berasrama yang sudah ada. Beberapa pemerintah daerah telah memiliki program sekolah berasrama baik sebagai sekolah

unggulan maupun sekolah akses. Sekolah-sekolah berasrama unggulan umumnya memiliki sistem yang lebih mapan dan mendapatkan perhatian yang lebih baik. Sekolah-sekolah ini perlu dipertahankan dan menjadi model bagi pengembangan sekolah-sekolah berasrama lain khususnya yang berada dalam satu wilayah provinsi. Para pendidiknya juga bisa diberdayakan sebagai rujukan dan sumber berbagi ilmu dan pengalaman bagi para pendidik sekolah-sekolah berasrama lain yang sama sekali baru. Namun demikian, pemerintah maupun pemerintah daerah perlu menyiapkan sistem regulasi yang bisa memayungi penyelenggaraan sekolah berasrama secara lebih berkelanjutan.

Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga mendirikan sekolah-sekolah berasrama untuk memfasilitasi para peserta didik yang tinggal di daerah terpencil. Namun, umumnya sekolah-sekolah ini lebih menjadi penampungan daripada sekolah berasrama sesungguhnya. Anak-anak hanya memperoleh pendidikan di sekolah dan selepas jam sekolah usai mereka tidak memiliki

aktivitas pembinaan. Asrama-asrama hanya menjadi tempat menginap. Sekolah-sekolah semacam ini perlu direvitalisasi, terutama dalam hal pengayaan aktivitas ekstrakurikuler dan pengasuhan dalam asrama. Beberapa fasilitas pendukung kegiatan ekstrakurikuler perlu dibangun dan guru-guru pembina asrama perlu dihadirkan.

#### **b. Restrukturisasi**

Pendirian sekolah berasrama juga bisa dilakukan dengan cara mengubah sekolah-sekolah reguler menjadi sekolah-sekolah berasrama. Ini bisa dilakukan baik untuk sekolah-sekolah unggulan maupun sekolah akses. Tentu saja diperlukan studi kelayakan terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan sekolah-sekolah tersebut. Studi kelayakan tersebut mencakup ketersediaan lahan dan kualitas kelembagaan masing-masing sekolah. Ketersediaan lahan sangat penting baik bagi sekolah unggulan maupun sekolah akses karena hal terpenting dalam restrukturisasi ini adalah membangun fasilitas asrama baru di dalam—atau di lingkungan yang berdekatan dengan—kompleks

sekolah. Namun demikian, sekolah bisa memindahkan keseluruhan aktivitas pendidikannya ke tempat baru jika lahan tersebut berada di tempat yang jauh dari lokasi sekolah lama.

Untuk membangun sekolah-sekolah berasrama unggulan dengan strategi restrukturisasi sekolah reguler, harus dipertimbangkan pula variabel mutu lembaga sekolah reguler tersebut. Dalam hal ini, pemerintah maupun pemerintah daerah bisa mengembangkan sekolah-sekolah eks-RSBI sebagai sekolah berasrama unggulan. Sekolah-sekolah ini telah memiliki modal yang relatif baik secara mutu sehingga fokus pengembangan bisa ditujukan kepada kualitas sistem pengasuhannya. Hal ini juga bisa menghemat alokasi pengembangan sumber daya karena sekolah-sekolah eks-RSBI umumnya memiliki kinerja lembaga, fasilitas pendidikan, dan kualitas tenaga pendidik yang lebih baik.

### **c. Kolaborasi**

Strategi lain pendirian sekolah berasrama adalah dengan menggandeng lembaga-lembaga

pendidikan berasrama non-formal yang telah mapan. Di Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan ini umumnya berasosiasi dengan lembaga pendidikan Islam pesantren yang jumlahnya menurut data Kementerian Agama mencapai 28 ribu lembaga. Pada praktiknya, strategi bekerja sama dengan pesantren ini adalah kebalikan dari restrukturisasi sekolah reguler. Namun, dalam hal ini yang ditambahkan bukan pendidikan asramanya, namun sekolah reguler formalnya. Jadi, pemerintah maupun pemerintah daerah memfasilitasi pendirian sekolah-sekolah negeri di pesantren.

Namun, strategi ini memiliki konsekuensi lebih kompleks karena melibatkan dua lembaga dan dua sistem yang berbeda. Dengan kerja sama ini kita tidak bisa serta merta mengubah sistem pendidikan pesantren yang telah mapan. Pesantren-pesantren tersebut tentunya memiliki santri yang sudah belajar di sana dengan cara tersendiri. Tentu harus dipertimbangkan hal-hal menyangkut status dan keberlangsungan pendidikan mereka dengan adanya kerja sama ini.

Selain itu, status sumber daya baru yang didatangkan perlu diperhatikan karena pesantren umumnya dimiliki oleh keluarga pendirinya. Guru-guru baru yang direkrut untuk mengajar di sekolah reguler juga perlu diberi pembekalan khusus agar mampu beradaptasi dengan lingkungan dan budaya pesantren. Oleh karena itu, untuk mengurangi kompleksitas, pada tahap awal, perlu dicari pesantren-pesantren yang memiliki latar belakang mengelola pendidikan formal keagamaan (MI, MTs, atau MA) sebagai prioritas kolaborasi. Sekolah-sekolah reguler yang akan didirikan di dalamnya akan berjalan berdampingan dengan madrasah-madrasah formal tersebut.

#### **d. Invensi**

Mendirikan unit sekolah baru adalah pilihan terakhir jika pilihan-pilihan lain tidak mungkin dilakukan. Strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Dengan membangun lembaga baru, kita bisa merancang dan membangun sekolah secara lebih leluasa sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan. Selain itu, dengan sekolah

baru, masyarakat bisa memperoleh alternatif yang benar-benar baru dari pilihan sekolah yang selama ini ada. Namun demikian, pada saat yang sama, strategi ini juga merupakan pilihan yang lebih kompleks karena membutuhkan persiapan yang lebih matang dan nilai investasi yang lebih tinggi. Para pengelola perlu mencari lahan baru dan memikirkan lokasi yang strategis. Pengelola juga perlu menganalisis soal “potensi pasar” siapa yang akan bersekolah di sekolah baru tersebut. Sekolah berasrama adalah sekolah yang unik yang tidak semua orang meminatinya kecuali jika sekolah tersebut benar-benar memiliki reputasi dan memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan umumnya orang tua siswa.

Oleh karena itu, mendirikan sekolah baru pertama-tama harus mempertimbangkan nilai-nilai dan identitas apa yang diusung oleh sekolah. Orang tua akan mempercayakan anak mereka untuk dididik dan bermukim di suatu lembaga yang mereka yakin dengan nilai-nilainya. Dengan demikian, keberlangsungan sekolah berasrama sangat bergantung pada konteks sosial budaya



masyarakat yang menjadi sasaran targetnya. Di Aceh yang kental dengan kultur keislaman, misalnya, mendirikan sekolah berasrama dengan identitas dan nilai keislaman akan memiliki potensi keberlangsungan lebih tinggi daripada sekolah keilmuan murni. Hal yang sama juga di daerah Papua atau Manado yang mayoritas Kristen, sekolah berasrama dengan identitas keagamaan Kristen juga akan lebih bertahan. Dengan begitu, sekolah bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di sekitar untuk mendidik siswa.

Hal lain yang penting dalam membangun sekolah baru adalah ketersediaan dan jaminan atas keberlangsungan sumber daya sekolah. Para pendiri harus mengembangkan sistem manajemen yang baik dan menganalisis potensi sumber pembiayaan sekolah di masa depan sehingga sekolah baru tersebut bisa terus bertahan. Beberapa sekolah berasrama yang didirikan pemerintah daerah banyak yang terbengkalai karena hal-hal semacam ini tidak diantisipasi sejak awal. Karena mendirikan sekolah berasrama

merupakan investasi mahal, maka kerja sama dengan masyarakat dan pihak swasta perlu terus dihidupkan. Rezim pemerintahan terus berganti dan setiap pemimpin pemerintahan mempunyai kebijakan dan prioritas yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, mengandalkan bantuan dari negara semata tentu tidaklah bijak.

## **2. Peran Pemerintah Pusat, Daerah, dan Masyarakat**

Sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sangat vital dalam investasi pengadaan sumber daya sekolah-sekolah berasrama. Porsi dari peran-peran ketiga sektor tersebut akan berbeda-beda bergantung pada jenis strategi pendirian sekolah berasrama yang diambil dan konteks daerah. Berikut ini akan disajikan ilustrasi bagaimana ketiga unsur tersebut bisa bekerja sama dalam pendirian sekolah berasrama jika strategi pendirian sekolah baru dipilih. Meski begitu, ilustrasi ini juga bisa digunakan sebagai acuan untuk pendirian sekolah dengan pilihan strategi yang lain, namun dengan porsi dan derajat yang berbeda-beda. Karena ini hanya merupakan ilustrasi, maka ia bukan referensi yang bersifat pasti dan mengikat. Pendirian sekolah berasrama harus

menyesuaikan dengan konteks dan kapasitas masing-masing. Secara ringkas, ilustrasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah.

Tabel 4.2 Ilustrasi Peran *Stakeholders* dalam Pengadaan Sumber Daya Sekolah Berasrama Baru

Sumber Daya	Pemangku Kepentingan		
	Pemerintah	Pemerintah Provinsi dan/atau Kab/Kota	Masyarakat
Infrastruktur	Investasi bangunan	Investasi lahan dan bangunan	Lahan dan bangunan tambahan
Sarana	Investasi peralatan pembelajaran	Investasi peralatan pembelajaran dan fasilitas ekstrakurikuler	Investasi fasilitas pembelajaran dan ekstrakurikuler tambahan
SDM	Pengembangan kompetensi	Rekrutmen dan pembinaan	Pengembangan kompetensi
Pembiayaan	Operasional dan non-operasional	Operasional dan non-operasional	Non-operasional dan operasional

#### **a. Infrastruktur (Lahan dan Bangunan)**

Pemerintah daerah yang merupakan penanggung jawab pengelolaan sekolah di wilayahnya adalah pihak yang paling bertanggung jawab menyiapkan lahan dan bangunan sekolah. Namun, jika kemampuan mereka terbatas, pemerintah pusat bisa membantu dalam hal penyediaan bangunan. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki kewenangan untuk menyediakan bangunan fasilitas publik baru, termasuk gedung sekolah dan asrama, terutama di wilayah-wilayah yang tertinggal. Namun, tetap saja pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kewenangannya, bertanggung jawab dalam hal perawatan infrastruktur tersebut. Baik pengadaan lahan dan bangunan bisa melibatkan peran serta masyarakat, terutama jika kemampuan daerah terbatas.

#### **b. Sarana**

Sarana pembelajaran terutama mencakup meubelair, media pembelajaran, peralatan pembelajaran, fasilitas kegiatan ekstrakurikuler,

dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pemerintah bisa membantu pengadaan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas pembelajaran dan asrama. Sementara itu, pemerintah daerah selain menyediakan peralatan dan fasilitas pembelajaran dan ekstrakurikuler juga bertanggung jawab menyediakan peralatan lain semisal meubelair dan fasilitas asrama. Namun, masyarakat terutama yang berasal dari dunia usaha melalui program-program CSR mereka bisa dilibatkan pula dalam menyediakan berbagai fasilitas di atas. Namun, masyarakat hanya akan termotivasi untuk terlibat jika konsep sekolah berasrama tersebut jelas dan inisiatif pembangunan dari negara juga telah ada.

**c. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah elemen penting dari sekolah berasrama. SDM sekolah berasrama terdiri dari banyak unsur, mulai kepala sekolah, guru, guru asrama, tenaga kependidikan, hingga bagian pengamanan. Rekrutmen awal semua sumber daya tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah pusat dapat membantu dalam hal pengembangan kompetensi SDM ini, terutama para guru dan pembina asrama. Dalam melakukan pengembangan kompetensi ini bisa dilibatkan peran serta LPMP di tiap-tiap wilayah dan juga unsur-unsur profesional yang ada di masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah juga bisa menggandeng lembaga-lembaga *non-profit* yang peduli pendidikan di masyarakat untuk berpartisipasi menyelenggarakan program peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan.

#### **d. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan faktor pendukung utama keberlangsungan sekolah berasrama. Terutama karena sekolah berasrama berbeda dari sekolah reguler di mana komitmen seluruh pihak dituntut lebih tinggi. Idealnya, ketiga sektor pemangku kepentingan memiliki porsi yang seimbang, baik dalam aspek operasional maupun non-operasional. Namun, melibatkan masyarakat terlalu jauh dalam pembiayaan dapat menjadi persoalan yang sensitif belakangan ini, terutama jika masyarakat itu

adalah orang tua peserta didik. Dalam tahap pendirian sekolah berasrama ini, peran pembiayaan masyarakat tentu bukan berasal dari orang tua dan proporsinya tidak bisa diharapkan bisa lebih banyak dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah bisa menjaring kontribusi dari pihak swasta seperti yayasan sosial, CSR perusahaan atau masyarakat sekitar lokasi sekolah yang peduli pada pendidikan. Sebagian besar kontribusi masyarakat akan lebih ditujukan pada pembiayaan non-operasional seperti pelatihan SDM, pembangunan gedung, penambahan fasilitas ekstrakurikuler, dan lain sebagainya.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN**

#### **A. Simpulan**

Kehadiran sekolah berasrama telah memberikan alternatif pendidikan bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Seiring dengan pesatnya modernitas, di mana orang tua tidak hanya suami yang bekerja tapi juga istri bekerja sehingga anak tidak lagi terkontrol dengan baik, maka sekolah berasrama adalah tempat terbaik untuk menitipkan anak-anak mereka karena dapat terjamin baik makanannya, kesehatannya, keamanannya, sosialnya dan yang paling penting adalah pendidikannya. Selain itu, polusi sosial dan dekadensi moral yang sekarang ini melanda lingkungan kehidupan masyarakat seperti pergaulan bebas, narkoba, tawuran pelajar, pengaruh media dan pergaulan remaja yang menyimpang lainnya ikut mendorong banyak orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah berasrama.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kesimpulan penelitian mengenai capaian sekolah berasrama. Pertama berkaitan dengan nilai identitas sekolah berasrama terdiri dari: ketarunaan, keagamaan,

keolahragaan, dan keilmuan. Untuk ketarunaan, peserta didik diasuh dengan pola militer, untuk keagamaan lebih pada pendalaman agama tertentu, untuk keolahragaan dikhususkan untuk pembinaan atlet dan untuk keilmuan cenderung pada peningkatan ilmu tertentu seperti *science* dan sebagainya. Kualifikasi akademik minimal untuk kepala sekolah adalah S2 atau magister. Di samping itu, pemilihan juga didasarkan pada pengalaman memimpin sekolah-sekolah lain sebelumnya. Dalam hal pemilihan kepala sekolah negeri, usulan berasal dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) sementara untuk sekolah swasta pemilihan dilakukan oleh pihak yayasan pengelola sekolah.

Kedua, mengenai kualifikasi akademik guru mata pelajaran adalah minimal S1 dengan jurusan yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Rekrutmen guru untuk sekolah negeri dilakukan dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau melalui mekanisme penempatan guru yang merupakan wewenang pemerintah daerah setempat. Sementara untuk sekolah swasta, mekanisme pangangkatan dapat melalui seleksi terbuka dan atau penunjukan langsung yayasan pengelola sekolah. Kinerja guru dievaluasi oleh kepala sekolah dan pengawas

sekolah dengan mempertimbangkan aspek kehadiran, pelaksanaan tugas dan program pengajaran, sikap dan perilaku keteladanan, dan capaian prestasi peserta didik. Mengingat sekolah berasrama adalah sekolah dengan durasi proses pendidikan yang lama, dapat dikatakan 24 jam, maka diperlukan guru yang lebih banyak. Kasus yang dikaji menunjukkan bahwa kisaran rasio guru-peserta didik adalah 1:5. Dalam hal kualifikasi akademik, kepala asrama disyaratkan untuk memiliki pendidikan minimal S1, sementara pembina asrama boleh berpendidikan lebih rendah dari S1.

Ketiga, untuk mekanisme pengangkatan pembina asrama adalah melalui seleksi terbuka atau diangkat langsung oleh kepala sekolah dan manajemen sekolah. Pertimbangan yang diambil dalam pengangkatan pembina asrama yaitu pengalaman dan kepribadian. Kinerja pembina asrama dievaluasi oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang asrama/kepala asrama dengan mempertimbangkan aspek kedisiplinan, ketaatan, kemampuan manajerial/mengatasi masalah, dan sebagainya. Berdasarkan kasus yang dikaji, kisaran rasio pembina asrama-peserta didik adalah 1:15.

Keempat, terkait keberadaan peserta didik sekolah berasrama diseleksi dengan mekanisme yang beraneka ragam, di antaranya yaitu seleksi nilai rapor, penelusuran minat dan bakat, dan ujian masuk mandiri. Sekolah memiliki kuota untuk calon peserta didik dengan kriteria tertentu, di antaranya peserta didik miskin, peserta didik berprestasi, dan peserta didik dalam satu wilayah dan peserta didik luar kota.

Kelima, berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam setiap sekolah berasrama setidaknya dibutuhkan luas lahan sekitar 1 hingga 7 hektar. Adapun beberapa komponen utama pada masing-masing sekolah berasrama meliputi ruang kelas ( $\pm 63 \text{ m}^2$ ), ruang guru ( $\pm 112 \text{ m}^2$ ), kamar peserta didik ( $\pm 36 \text{ m}^2$ ), perpustakaan ( $\pm 200 \text{ m}^2$ ), laboratorium IPA ( $\pm 80 \text{ m}^2$ ), laboratorium IPS ( $\pm 80 \text{ m}^2$ ), laboratorium bahasa ( $\pm 80 \text{ m}^2$ ), laboratorium komputer ( $\pm 80 \text{ m}^2$ ), ruang makan ( $\pm 200 \text{ m}^2$ ), dapur ( $\pm 150 \text{ m}^2$ ), kantin ( $\pm 150 \text{ m}^2$ ), rumah ibadah ( $\pm 225 \text{ m}^2$ ), aula/ruang pertemuan ( $\pm 250 \text{ m}^2$ ), koperasi ( $\pm 60 \text{ m}^2$ ), dan sebagainya.

Keenam, berkaitan dengan komponen pengeluaran dana untuk sekolah berasrama meliputi Kegiatan Belajar Mengajar ( $\pm 8\%$ ), Konsumsi ( $\pm 44\%$ ), Gaji dan Tunjangan Non-PNS ( $\pm 26\%$ ), Pengadaan Sarpras ( $\pm 12\%$ ), dan

Perawatan Sarpras ( $\pm 10\%$ ). Berdasarkan hasil analisis data sekunder di beberapa sekolah berasrama, ditemukan rata-rata besaran *unit cost* per peserta didik sebesar  $\pm \text{Rp}4.500.000,00/\text{peserta didik/bulan}$  (negeri) dan sebesar  $\pm \text{Rp}12.500.000,00/\text{peserta didik/bulan}$  (swasta).

Ketujuh, mengenai kerja sama dengan pihak luar untuk meningkatkan kualitasnya, sekolah berasrama menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti universitas, dunia industri, alumni, dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama tersebut meliputi penerapan kurikulum pembelajaran, pengembangan kegiatan non-akademik/ekstrakurikuler, pengembangan SDM, dan pengembangan fasilitas.

Selanjutnya, dalam mengelola sekolah berasrama perlu dipertimbangkan beberapa aspek ketersediaan dan jaminan atas keberlangsungan sumber daya sekolah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek: pengelolaan kurikulum, optimalisasi kepemimpinan kepala sekolah, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan peserta didik, pengelolaan sarana prasarana pendidikan, dan manajemen pembiayaan pendidikan. Dalam mengelola semuanya ini diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam investasi

pengadaan sumber daya sekolah-sekolah berasrama. Porsi dari peran-peran ketiga sektor tersebut akan berbeda-beda bergantung pada jenis strategi pendirian sekolah berasrama yang diambil dan konteks daerah. Selain itu para pengelola/manajemen harus mengembangkan sistem manajemen yang baik dan menganalisis potensi sumber pembiayaan sekolah di masa depan sehingga sekolah baru tersebut bisa terus bertahan. Beberapa sekolah berasrama yang didirikan pemerintah daerah banyak yang terbengkalai karena hal-hal semacam ini tidak diantisipasi sejak awal. Karena mendirikan sekolah berasrama merupakan investasi mahal, maka kerja sama dengan masyarakat dan pihak swasta perlu terus dihidupkan. Berdasarkan hasil analisis data sekunder dan survey, berikut ini disampaikan kesimpulan nilai dan capaian sekolah berasrama.

**Tabel 5.1 Kesimpulan Nilai dan Capaian Sekolah Berasrama**

Komponen	Uraian
Nilai-nilai	Terdiri dari: Ketarunaan, Keagamaan, keolahragaan, dan Keilmuan.
Kurikulum dan Sistem Pengasuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar sekolah berasrama melakukan modifikasi dan pengembangan kurikulum secara mandiri</li> <li>Kurikulum yang dikembangkan meliputi kurikulum nasional (K13) dan kurikulum Cambridge atau sejenis</li> <li>Penyusunan kurikulum oleh tim yang terdiri dari guru mata pelajaran dan konsultan</li> <li>Capaian hasil belajar terdiri dari komponen ujian hasil belajar dan perilaku di asrama (kedisiplinan, sikap, kemandirian, dan sebagainya)</li> <li>Selain pembelajaran akademik, sekolah memberikan pembelajaran non akademik/ekstrakurikuler yang terdiri dari beberapa jenis seperti kerohanian, kewirausahaan, olahraga, kesenian, dan sebagainya</li> <li>Kurikulum non akademik/ekstrakurikuler disusun sendiri oleh tim khusus sekolah dan Pembina asrama</li> <li>Model pengasuhan di asrama dilakukan oleh Pembina asrama dengan cara mengawasi kegiatan siswa di luar jam pembelajaran, pemberian konseling dan penegakan peraturan asrama. Selain itu ada pertemuan rutin setiap minggunya yang dilakukan oleh Pembina asrama kepada siswa dalam upaya pembinaan siswa.</li> <li>Peraturan kehidupan di asrama yang disusun oleh kepala sekolah bersama tim manajemen disosialisasikan melalui pembagian buku pribadi siswa, papan pengumuman dan saat pertemuan rutin. Sanksi teringan atas terjadinya pelanggaran berupa teguran</li> </ul>

Komponen	Uraian
Manajemen Sekolah	
SDM: Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualifikasi akademik minimal S2</li> <li>Diusulkan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat serta berstatus PNS (Negeri)/ ditunjuk oleh Yayasan (Swasta)</li> <li>Memiliki pengalaman memimpin di sekolah sebelumnya (pada sekolah non asrama)</li> <li>Program pengembangan SDM oleh Kepala Sekolah terdiri dari: pelatihan manajerial, pengembangan kurikulum, kewirausahaan, dan sebagainya</li> <li>Kepala sekolah dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota (Negeri) atau Yayasan (Swasta) dengan mempertimbangkan capaian mutu dan prestasi sekolah</li> </ul>
SDM: Guru Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualifikasi akademik minimal S1 dengan jurusan yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu</li> <li>Mekanisme pangangkatan melalui seleksi terbuka dan atau penunjukan langsung oleh Pemerintah/Yayasan</li> <li>Kinerja guru dievaluasi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan mempertimbangkan aspek kehadiran, pelaksanaan tugas dan program pengajaran, sikap dan perilaku keteladanan, dan capaian prestasi siswa</li> <li>Kisaran rasio guru-siswa 1:15</li> </ul>
SDM: Pembina Asrama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualifikasi akademik minimal S1 (kepala asrama) dan di bawah S1 (Pembina asrama)</li> <li>Mekanisme pangangkatan melalui seleksi terbuka dan ada yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan Tim Manajemen</li> <li>Mekanisme pangangkatan oleh Kepala Sekolah dan tim manajemen (bagi status PNS) serta ada pula yang melalui seleksi terbuka (non PNS)</li> <li>Pertimbangan pangangkatan Pembina asrama yaitu pengalaman dan kepribadian</li> <li>Kinerja Pembina asrama dievaluasi oleh kepala sekolah dan wakasek asrama/ kepala asrama dengan mempertimbangkan aspek kedisiplinan, ketaatan, kemampuan manajerial/mengatasi masalah, dan sebagainya</li> <li>Kisaran rasio pembina-siswa 1:20</li> </ul>

Komponen	Uraian
<b>Manajemen Sekolah</b>	
<b>SDM: Peserta Didik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme seleksi beraneka ragam, meliputi: seleksi nilai rapor, penelusuran minat dan bakat, ujian masuk mandiri</li> <li>Sekolah memiliki kuota untuk beberapa golongan calon siswa, meliputi siswa miskin, siswa berprestasi, siswa dalam satu wilayah dan siswa luar kota.</li> <li>Terdapat sekolah khusus siswa miskin berprestasi</li> </ul>
<b>Sarana dan Prasarana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber pengadaan utama dari Pemerintah (Negeri) dan Yayasan (Swasta)</li> <li>Luas lahan yang dibutuhkan <math>\pm 1</math> s.d 7 hektar</li> <li>Komponen utama terdiri dari: ruang kelas (<math>\pm 63\text{m}^2</math>), ruang guru (<math>\pm 112\text{m}^2</math>), kamar siswa (<math>\pm 36\text{m}^2</math>), perpustakaan (<math>\pm 200\text{m}^2</math>), Lab IPA (<math>\pm 80\text{m}^2</math>), Lab IPS (<math>\pm 80\text{m}^2</math>), Lab Bahasa (<math>\pm 80\text{m}^2</math>), Lab Komputer (<math>\pm 80\text{m}^2</math>), Ruang Makan (<math>\pm 200\text{m}^2</math>), dapur (<math>\pm 150\text{m}^2</math>), kantin (<math>\pm 150\text{m}^2</math>), rumah ibadah (<math>\pm 225\text{m}^2</math>), aula/ruang pertemuan (<math>\pm 250\text{m}^2</math>), koperasi (<math>\pm 60\text{m}^2</math>), dan sebagainya</li> <li>Mekanisme perawatan dilakukan berkala oleh petugas kebersihan sekolah dengan diawasi oleh kepala sekolah dan tim manajemen sekolah</li> </ul>
<b>Pembiayaan Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerimaan dana untuk membiayai sekolah diperoleh dari BOS Pusat dan BOSDA (Negeri), dan Orangtua siswa, Yayasan dan Pemerintah Pusat/Daerah berupa BOS/BOSDA (Swasta)</li> <li>Komponen pengeluaran dana meliputi Kegiatan Belajar Mengajar (<math>\pm 16\%</math>), Konsumsi (<math>\pm 34\%</math>), Gaji dan Tunjangan Non PNS (<math>\pm 26\%</math>), Pengadaan Sarpras (<math>\pm 12\%</math>), dan Perawatan Sarpras (<math>\pm 12\%</math>)</li> <li>Besaran unit cost per siswa sebesar <math>\pm \text{Rp } 2.500.000/\text{siswa}/\text{bulan}</math> (Negeri) dan sebesar <math>\pm \text{Rp } 8.500.000/\text{siswa}/\text{bulan}</math> (Swasta)</li> </ul>
<b>Kerjasama dengan Pihak Luar</b>	Meliputi: penerapan kurikulum pembelajaran, pengembangan kegiatan non akademik/ekstrakurikuler, pengembangan SDM, Pengembangan fasilitas, dan lainnya.

## B. Opsi Kebijakan

1. Perlu dibentuk peraturan mengenai pengelolaan sekolah berasrama yang mencakup aturan standar layanan minimal sekolah (kurikulum, sarpras, pendidik, pembiayaan, dan lain-lain) sebagai dasar hukum pengelolaan sekolah berasrama.
2. Sistem sekolah berasrama perlu dikembangkan, terutama untuk siswa yang jauh dari sekolah, siswa



miskin berprestasi, dan siswa berkeahlian khusus (bidang olahraga, seni, dan lain-lain).

3. Sekolah berasrama perlu dikembangkan dan dikelola berbasis komunitas dengan dukungan pemerintah dan masyarakat demi keberlanjutan program asrama.
4. Pengelolaan sekolah berasrama perlu menekankan pada kebutuhan pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan kecakapan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew dan Orodho, 2014. *Socio-economic Factors Influencing Pupils' Access to Education in Informal Settlements: a Case of Kibera, Nairobi Country, Kenya*. International Journal of Education and Research Volume 2 No. 3 March 2014.
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Angka Partisipasi Murni Tahun 2016 Sekolah Menengah/Sederajat*. Diakses bulan Mei 2017 melalui website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Jumlah Penduduk Indonesia Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2012-2016*. Diakses Mei 2017 melalui website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Ismunandar, 2017. *Laporan Perkembangan Sekolah Berasrama di Amerika Serikat*. Head of Education and Culture Section, Embassy of the Republic of Indonesia.
- Kedubes RI, 2016. *Laporan Boarding School di Australia Sebagai Bahan Masukan Program Sekolah Berasrama di Indonesia*. Canberra.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017. *Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak*. Diakses melalui [www.bankdata.kpai.go.id](http://www.bankdata.kpai.go.id) pada tanggal 17 Februari 2017.
- Kusmintardjo, 1992. *Pengelolaan Layanan Khusus di Sekolah*. Jilid II. Malang: UPT Perpustakaan UM.

*Penyelenggaraan Pelatihan dengan Sistem Asrama (Boarding School)*. Malang: FIP UM.

Lestari, Niken Ajeng, 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah serta Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama: Data Panel 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2006 Hingga 2011*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Marsh, H. W., & Kleitman, S., 2002. *Extracurricular School Activities: The Good, The Bad, and The Non Linear*. Educational Review, 72(4), 464-514.

OECD, 2017. *PISA 2000-2015 Results*. PISA, OECD Publishing.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9/Permen/M/2008 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pusat Penilaian Pendidikan, 2012. *Kemampuan Membaca Peserta Didik Kelas IV Sekolah Dasar di Provinsi Kalimantan Timur dan D.I. Yogyakarta*. Balitbang, Kemdikbud.

Putra, Surya Rosa, 2017. *Sekolah Berasrama di Perancis*. Atdikbud Paris.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  
tentang Sistem Pendidikan Nasional.







# SEKOLAH BERASRAMA

Sekolah berasrama memiliki potensi yang selama ini belum banyak dikembangkan, terutama oleh pemerintah. Terdapat tiga potensi yang dapat diidentifikasi dari sekolah berasrama, yaitu pembangunan karakter, mutu, dan akses. Sekolah berasrama dapat menjadi salah satu model lembaga pendidikan yang dapat mendukung dalam pengembangan akhlak dan karakter bagi peserta didik. Selain itu, peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah berasrama juga dapat memperoleh mutu pendidikan yang baik. Terakhir, sekolah berasrama dapat menjadi solusi bagi terbatasnya akses pendidikan di wilayah-wilayah terpencil yang ada di Indonesia. Pada konteks saat ini, urgensi atau kebutuhan peraturan tentang sekolah berasrama, adalah untuk memberi landasan atau payung hukum yang kuat guna membantu pemerintah dalam melakukan pengelolaan sekolah berasrama dan mengembangkan potensi yang ada demi mendukung tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan hasil analisis data sekunder dan survey, berikut ini disampaikan kesimpulan nilai dan capaian sekolah berasrama:

Opsi kebijakan yang disampaikan adalah 1) perlu dibentuk peraturan mengenai pengelolaan sekolah berasrama yang mencakup aturan standar layanan minimal sekolah (kurikulum, sarpras, pendidik, pembiayaan, dll) sebagai dasar hukum pengelolaan sekolah berasrama; 2) sistem sekolah berasrama perlu dikembangkan, terutama untuk siswa yang jauh dari sekolah, siswa miskin berprestasi, dan siswa berkeahlian khusus (bidang olahraga, seni, dll); 3) sekolah berasrama perlu dikembangkan dan dikelola berbasis komunitas dengan dukungan pemerintah dan masyarakat demi keberlanjutan program asrama; dan 4) pengelolaan sekolah berasrama perlu menekankan pada kebutuhan pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan kecakapan hidup.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2018

ISBN 978-602-0792-05-7

